EFEKTIVITAS SOP PEMBIAYAAN *BAI' BITSAMAN AJIL* (BBA) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM

(Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

MHD. RAFLY SYAHPUTRA

NIM 3322341

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2025/2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Rafly Syahputra

Nim : 3322341

Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Efektivitas SOP Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) untuk Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas Adalah benar asli karya tulis penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sabagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Juni 2026

Penulis

Mhd. Rafly Syahputra

3322341

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul ***"Efektivitas SOP Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) untuk Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)"***, yang disusun oleh M. Rafly Syahputra Nim 3322341, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah memenuhi persyaratan Ilmial dan disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah,

Dengan demikian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bukittinggi, 15 Juni 2026

Pembimbing

Gina Havieza Elmizan, S.E., M.E
NIP. 199205272020122019

ABSTRAK

Penelitian ini disusun oleh **MHD. RAFLY SYAHPUTRA**, dengan judul skripsi ***"Efektivitas SOP Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) untuk Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)"***, NIM **3322341**, Program Studi **Perbankan Syariah**, di bawah bimbingan **Gina Havieza Elmizan, SE., ME.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada perguruan tinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal serta akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam kondisi tersebut, KJKS BMT Agam Madani hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) sebagai alternatif permodalan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KJKS BMT Agam Madani dalam pengembangan UMKM, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan BBA, serta efektivitas SOP pembiayaan dalam mendukung pengembangan UMKM di Nagari Pakan Sinayan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas SOP pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam pengembangan UMKM pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak internal lembaga dan nasabah pembiayaan, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi terkait data pembiayaan BBA periode 2022–2024. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan SOP pembiayaan serta efektivitasnya dalam mendukung perkembangan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, KJKS BMT Agam Madani memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), terutama dalam penyaluran modal usaha, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek SOP pembiayaan, indikator kejelasan prosedur dan efektivitas pelaksanaan telah berjalan dengan baik karena tahapan pembiayaan tersusun secara sistematis dari pengajuan hingga pencairan serta memiliki aturan yang jelas. Namun, indikator efisiensi waktu pelaksanaan masih belum optimal karena proses administrasi yang panjang, mekanisme rapat pembiayaan, serta persyaratan jaminan yang dirasakan memberatkan sebagian nasabah.

Pada aspek efektivitas pembiayaan, indikator kepuasan nasabah, keadaptasian, dan pengembangan menunjukkan hasil yang efektif karena pembiayaan mampu memberikan manfaat nyata berupa tambahan modal, peningkatan stabilitas usaha, dan perkembangan usaha nasabah. Akan tetapi, indikator efisiensi masih kurang efektif karena proses pembiayaan relatif lama dan persyaratan yang cukup ketat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BBA di KJKS BMT Agam Madani secara umum telah efektif dalam mendukung pengembangan UMKM.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, penulis ucapkan terima kasih atas kehadirat Allah. SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Efektivitas SOP Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Untuk Pengembangan UMKM (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk dukungan moral maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Deri Febriadi** dan ibunda **Neneng Yulianti** tercinta. Selanjutnya kepada adek-adek saya dan teman-teman yang selalu menemani masa perkuliahan saya, yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta berbagai bentuk pengorbanan, baik secara moral maupun material, demi terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku rektor, Bapak **Dr. Afrinaldi, S. Sos.I., MA**, selaku wakil rektor I, **Bapak Prof. Dr. liz Izmuddin, MA**. Selaku wakil rektor II dan Bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum** wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu **Era Sonita, SE, M.Si,** selaku wakil dekan I , Bapak **Ali Rahman, SH, MH** selaku wakil dekan II, dan Bapak **Zuwardi, M.A** selaku wakil dekan III
3. Ibuk **Septria Susanti, SE, M.E** selaku ketua program Studi Perbankan Syariah dan Ibuk **Santi Deswita, SE, M.E** selaku sekretaris program Studi Perbankan Syariah, dan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Ibuk **Gina Havieza Elmizan, SE., ME** selaku pembimbing yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibuk **HJ. Zulhelmi** selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam mencari judul skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i** Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi ini.
7. **Manajer dan Karyawan BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan** yang telah memberi izin dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. **Nasabah BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan** yang telah memberi informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Penulis juga dengan siap menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Bukittinggi, 15 Juni 2026

Penulis

MHD. RAFLY SYAHPUTRA

NIM : 3322341

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 12

C. Batasan Masalah 13

D. Rumusan Masalah 13

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 14

F. Penjelasan Judul 15

BAB II LANDASAN TEORI **19**

A. Peran Lembaga Keuangan Non Bank 19

B. Perilaku Nasabah Pembiayaan 22

C. SOP Pembiayaan 25

D. Efektivitas Pelaksanaan SOP 29

E. Akad Bai' Bitsa'man Ajil (BBA) 35

F. Pengembangan UMKM 40

G. Kajian Terdahulu 45

H. Kerangka Konseptual 49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **52**

A. Jenis Penelitian 52

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 52

C. Jenis dan Sumber Data 53
D. Informan Penelitian 53
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Metode Analisis Data 57
G. Instrumen Penelitian 58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59
B. Hasil Penelitian 65
C. Pembahasan 78
BAB V PENUTUP 96
A. Kesimpulan 96
B. Saran 97
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pembiayaan.....3

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....46

Tabel 3.1 Modal Awal BMT.....59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor usaha kecil berbasis rumah tangga dan masyarakat pedesaan. Dalam kondisi perekonomian yang terus mengalami perubahan, UMKM dinilai mampu bertahan dan beradaptasi karena sebagian besar usaha dijalankan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta membantu pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

Walaupun UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, para pelaku usaha masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu kendala yang paling sering dialami adalah terbatasnya modal usaha. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menambah kapasitas produksi, membeli perlengkapan usaha, memenuhi kebutuhan bahan baku, serta memperluas pemasaran produk. Akibatnya, banyak usaha yang masih dijalankan secara sederhana dengan kemampuan pengembangan yang terbatas, sehingga pertumbuhan usaha cenderung

lambat dan daya saingnya lebih rendah dibandingkan usaha yang memiliki modal lebih besar.

Selain keterbatasan modal, akses terhadap lembaga keuangan formal juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Sebagian besar lembaga keuangan konvensional menetapkan persyaratan administrasi dan jaminan yang cukup ketat sehingga tidak semua pelaku usaha kecil mampu memenuhi ketentuan tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Padahal, keberadaan modal usaha sangat penting dalam mendukung kelangsungan dan peningkatan produktivitas usaha.

Dalam kondisi tersebut, lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) menerapkan sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam yang menekankan nilai keadilan, keterbukaan, kerja sama, dan tolong-menolong, serta menghindari praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan syariah menggunakan akad yang jelas dan disepakati bersama antara pihak lembaga dengan nasabah.

KJKS BMT Agam Madani sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Melalui pembiayaan tersebut, lembaga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil untuk

memperoleh tambahan modal usaha maupun kebutuhan usaha lainnya dengan sistem pembayaran secara angsuran yang lebih ringan dan terjangkau. Selain membantu memenuhi kebutuhan modal, pembiayaan BBA juga memberikan kepastian pembayaran karena jumlah angsuran dan jangka waktu pelunasan telah ditetapkan sejak awal akad.

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* pada KJKS BMT Agam Madani, berikut disajikan data realisasi pembiayaan BBA selama periode 2022–2024.

Tabel 1.1 Realisasi Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Bulan	Jumlah (2022)	Realisasi 2022 (Rp)	Jumlah (2023)	Realisasi 2023 (Rp)	Jumlah (2024)	Realisasi 2024 (Rp)
Jan	22	254.500.000	27	181.500.000	16	56.500.000
Feb	23	229.000.000	18	136.000.000	18	156.500.000
Maret	13	129.000.000	18	141.000.000	6	50.500.000
April	7	80.000.000	4	48.000.000	6	65.000.000
Mei	10	98.000.000	16	138.000.000	12	71.500.000
Juni	18	133.500.000	14	94.500.000	13	101.385.000
Juli	12	121.500.000	18	158.500.000	6	84.000.000
Agus	10	142.000.000	26	178.519.500	15	94.000.000
Sep	11	188.500.000	11	122.500.000	14	185.000.000
Okt	14	173.500.000	8	63.000.000	13	126.500.000
Nov	17	133.540.000	15	84.900.000	13	126.500.000
Des	21	286.046.000	23	291.389.000	14	124.500.000

Sumber: Data pembiayaan akad BBA KJKS BMT Agam Madani (diolah, 2022–2024)

Berdasarkan data realisasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* selama periode 2022–2024, diketahui bahwa jumlah nasabah dan nilai pembiayaan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, total realisasi pembiayaan mencapai Rp1.969.086.000 dengan jumlah nasabah sebanyak 178 orang. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah

nasabah meningkat menjadi 198 orang dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp1.637.808.500. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah penerima pembiayaan menurun menjadi 146 nasabah dengan total realisasi sebesar Rp1.241.885.000.

Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* masih dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sebagai sumber tambahan modal usaha. Namun, realisasi pembiayaan yang mengalami perubahan yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembiayaan belum berjalan secara stabil. Pada beberapa periode terjadi peningkatan jumlah pembiayaan, sedangkan pada periode lainnya mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi proses administrasi pembiayaan yang relatif panjang, adanya persyaratan jaminan atau agunan yang harus dipenuhi nasabah, serta pembatasan jumlah dan nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi maupun menyediakan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan yang baik. SOP pembiayaan diperlukan sebagai pedoman agar proses

pembiayaan dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat melalui sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.[1] Keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Dalam lembaga keuangan non bank, peran tersebut dapat dilihat dari kemampuannya mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan, membantu perkembangan UMKM, serta menyalurkan dana secara efektif dan efisien kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha.

Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Rendi Renaldi, yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan UMKM, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.[2] Melalui pembiayaan syariah, pelaku UMKM memperoleh alternatif sumber modal yang lebih mudah dijangkau dengan sistem pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan non bank mampu membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM melalui sistem

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani Press, 2001).

[2] Rendi Renaldi, Slamet Karmawan, and Keberadaan Lembaga, "PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM Keuangan Yang Berlandaskan Keadilan , Kemanfaatan (Maslahat)," 3, no. 2 (2024): 102–14.

pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) selama periode 2022–2024 yang menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dilakukan secara rutin setiap bulan. Pada tahun 2022 jumlah nasabah penerima pembiayaan tercatat sebanyak 178 orang dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp1.969.086.000. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah penerima pembiayaan meningkat menjadi 198 nasabah dengan total realisasi sebesar Rp1.637.808.500. Sementara itu, pada tahun 2024 pembiayaan masih terus disalurkan kepada 146 nasabah dengan total realisasi mencapai Rp1.241.885.000. Data tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran dana berjalan secara berkelanjutan dan cukup efisien sehingga masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat sesuai kebutuhan usahanya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman agar proses pembiayaan dapat berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Kasmir, SOP pembiayaan mencakup tahapan yang dilakukan dalam pemberian pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis, persetujuan, pencairan dana, hingga pelunasan.[3] Penerapan SOP bertujuan untuk membantu lembaga keuangan menjalankan proses

[3] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

pembiayaan dengan lebih baik sekaligus mengurangi risiko kesalahan dan pembiayaan bermasalah.

Dalam praktiknya, SOP pembiayaan dapat dilihat melalui indikator efektivitas pelaksanaan prosedur, efisiensi pelaksanaan, dan ketepatan dokumentasi pembiayaan. Pendapat tersebut juga didukung oleh penelitian Hasnina yang menjelaskan bahwa pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dilakukan melalui prosedur tertentu agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah serta mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.[4]

Hal tersebut dapat dilihat dari data realisasi pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil selama periode 2022–2024 yang menunjukkan adanya perubahan jumlah nasabah dan nilai pembiayaan setiap bulannya. Pada tahun 2022, realisasi pembiayaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp286.046.000 kepada 21 nasabah, sedangkan realisasi terendah terjadi pada bulan April sebesar Rp80.000.000 kepada 7 nasabah. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi tertinggi kembali terjadi pada bulan Desember sebesar Rp291.389.000 kepada 23 nasabah, sementara realisasi terendah berada pada bulan April sebesar Rp48.000.000 kepada 4 nasabah.

Adapun pada tahun 2024 jumlah realisasi pembiayaan cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun pada beberapa bulan tertentu masih mengalami peningkatan, seperti pada bulan September sebesar Rp185.000.000 kepada 14 nasabah. Data tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan belum sepenuhnya berjalan secara stabil dan efisien.

[4] Hasnina Hasnina, "Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Bmt Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–22, https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2154.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti proses administrasi yang cukup panjang, persyaratan jaminan, kemampuan nasabah dalam memenuhi ketentuan pembiayaan, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa indikator SOP pembiayaan masih menghadapi hambatan karena proses pembiayaan membutuhkan tahapan yang relatif lama.

Selain itu, indikator efisiensi pelaksanaan juga belum optimal akibat lamanya proses administrasi dan adanya pembatasan jumlah nasabah penerima pembiayaan. Di sisi lain, indikator ketepatan dokumentasi terlihat dari ketatnya persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi nasabah sebelum pembiayaan dapat dicairkan. Oleh karena itu, penerapan SOP pembiayaan yang baik sangat diperlukan agar proses pembiayaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung perkembangan UMKM secara berkelanjutan.

Menurut Dahlan Siamat, efektivitas pembiayaan dipengaruhi oleh ketepatan prosedur pembiayaan, kualitas analisis yang dilakukan lembaga, serta kemampuan dalam mengawasi penggunaan dana oleh nasabah.[5] Pembiayaan yang dilaksanakan sesuai prosedur akan membantu meningkatkan keberhasilan usaha nasabah sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Sejalan dengan itu, penelitian Hadi Ismanto menjelaskan bahwa efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari kelancaran pengembalian pembiayaan serta kemampuan pembiayaan dalam membantu

[5] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter Dan Perbankan* (jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI), 2000).

perkembangan usaha nasabah.[6] Pembiayaan yang berjalan dengan baik akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, seperti bertambahnya modal kerja, meningkatnya kelancaran operasional usaha, serta naiknya pendapatan usaha masyarakat.

Hal ini terlihat dari data realisasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS BMT Agam Madani selama periode 2022–2024. Data menunjukkan bahwa pembiayaan BBA terus disalurkan kepada masyarakat setiap bulannya dengan jumlah penerima pembiayaan yang cukup banyak. Pada tahun 2022, jumlah penerima pembiayaan tercatat sebanyak 178 nasabah dengan total realisasi sebesar Rp1.969.086.000. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah nasabah meningkat menjadi 198 orang dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp1.637.808.500. Sementara itu, pada tahun 2024 pembiayaan masih tetap disalurkan kepada 146 nasabah dengan total realisasi mencapai Rp1.241.885.000.

Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* masih memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam memperoleh tambahan modal usaha. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara terus-menerus setiap tahun menunjukkan bahwa pembiayaan BBA masih dibutuhkan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pembiayaan syariah dan pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas SOP

[6] Hadi Ismanto & Tohir Diman, "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PINJAMAN PROGRAM PEMBIAYAAN UMKM OLEH KOPERASI," 2013.

pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam mendukung pengembangan UMKM pada lembaga keuangan mikro syariah di tingkat lokal masih terbatas, khususnya pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran KJKS BMT Agam Madani dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil, bagaimana penerapan SOP pembiayaan yang digunakan, serta bagaimana efektivitas pelaksanaan pembiayaan tersebut dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas SOP Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) untuk Pengembangan UMKM (Studi Kasus pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas SOP pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara jelas bagaimana peran KJKS BMT Agam Madani dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).
2. Penerapan SOP pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti proses administrasi

yang panjang, adanya pembatasan jumlah nasabah, dan pembatasan nominal pembiayaan pertama.

3. Efektivitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam mendukung perkembangan UMKM masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti prosedur pembiayaan, kemampuan nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan dan adanya pembatasan jumlah nasabah pembiayaan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pembiayaan dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, khususnya KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan.
2. Analisis efektivitas difokuskan pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan yang meliputi prosedur pengajuan, penentuan plafon pembiayaan, dan persyaratan jaminan
3. Subjek penelitian dibatasi pada nasabah atau UMKM yang menggunakan produk pembiayaan BBA di KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan.
4. Penelitian tidak membahas akad pembiayaan syariah lain (seperti *mudharabah, musyarakah,* atau *murabahah*) dan tidak menganalisis faktor eksternal di luar SOP BBA yang memengaruhi perkembangan UMKM.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KJKS BMT Agam Madani dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)?
2. Bagaimana penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KJKS BMT Agam Madani dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan.

3. Untuk mengetahui efektivitas SOP pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dalam mendukung pengembangan UMKM pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
    1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pembiayaan syariah dan pengelolaan SOP pembiayaan berbasis akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)**.**
    2. Memperkaya kajian literatur metodologis mengenai hubungan antara efektivitas SOP lembaga keuangan mikro syariah dan kinerja ekonomi masyarakat kecil.
2. Manfaat Praktis
    1. Bagi KJKS/BMT Agam Madani, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan SOP pembiayaan BBA agar lebih sederhana, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah UMKM.
    2. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi praktis mengenai prosedur pembiayaan syariah, sehingga mereka dapat lebih siap dalam memenuhi persyaratan dan memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara optimal.

3. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat menunjukkan potensi dan tantangan nyata dalam penerapan sistem pembiayaan syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat

F. Penjelasan Judul

1. Efektivitas

   Efektivitas berasal dari kata *efektif* yang bermakna tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam merealisasikan target atau tujuan yang telah direncanakan.[7] Dalam hal ini, efektivitas menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Haryanto dan Arifuddin, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pengukurannya didasarkan pada perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.[8]

2. Standard Operasional Prosedur

   Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman yang disusun untuk memastikan seluruh aktivitas operasional dalam

[7] Rahmadytha Adelia Pratiwi and Kiagus Muhammad Sobri, "Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan" 11, no. 2 (2022): 17–34.

[8] Arifuddin dkk, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pert (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2007).

organisasi atau perusahaan berjalan secara efisien dan terarah.[9] SOP berisi panduan yang menjelaskan secara rinci tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan dalam melaksanakan tugas tertentu. Panduan tersebut dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti diagram alir proses, spesifikasi material, maupun bentuk lainnya yang mendukung pelaksanaan kerja. Dengan demikian, SOP berfungsi sebagai acuan dalam menjaga kelancaran kegiatan operasional serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan.

3. Pembiayaan

Dalam sistem keuangan syariah, pembiayaan memiliki peranan penting sebagai sarana penyaluran dana kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan atau *financing* merupakan bentuk penyediaan dana dari satu pihak kepada pihak lain guna mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui lembaga.[10] Dengan demikian, pembiayaan dapat dipahami sebagai dana yang disalurkan untuk menunjang pelaksanaan investasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Bai' Bitsaman Ajil*

---

[9] Juli dkk, "Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur The Importance of Standard Operating Procedure (SOP) in Improving Operational Efficiency and Consistency in the Company M" 1, no. 3 (2024): 2–15.

[10] Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah" 9, no. 1 (2015): 183–204.

Bai' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan istilah yang berasal dari tiga kata utama, yaitu *bai'* yang berarti jual beli, *tsaman* yang berarti harga, dan *ajil* yang bermakna penangguhan atau pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Secara terminologis, BBA adalah salah satu bentuk akad dalam keuangan syariah yang menggunakan prinsip jual beli dengan sistem pembayaran tangguh atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[11] Dalam praktiknya, penjual terlebih dahulu menyediakan atau membeli barang yang dibutuhkan oleh pembeli, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Pembayaran atas transaksi tersebut dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, akad BBA memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh barang tanpa harus membayar secara tunai, sekaligus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba.

5. Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas usaha agar mampu bertahan, tumbuh, dan berkembang secara berkesinambungan serta memiliki daya saing di pasar.[12] Upaya pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti penambahan modal usaha, pengembangan dan inovasi produk,

[11] Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

[12] Ainul Hayat Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 'Emping Jagung' Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)" 1, no. 6 (n.d.): 1286–95.

perluasan jaringan pemasaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan produksi. Selain itu, dukungan dari pihak eksternal, seperti pemerintah maupun lembaga terkait, memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan UMKM melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, promosi produk, serta pemberian akses terhadap sumber pembiayaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Lembaga Keuangan Non Bank

Dalam mendukung kemajuan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan non bank memiliki peran yang penting, terutama dalam membantu menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan non bank perlu dipahami melalui pendapat beberapa ahli sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

Menurut Kasmir**,** lembaga keuangan non bank berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.[13] Selain itu, lembaga keuangan non bank juga menyediakan berbagai jasa keuangan yang dapat membantu kelancaran kegiatan usaha serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan non bank memiliki peran penting dalam sistem keuangan sebagai lembaga perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.[14] Melalui peran tersebut, lembaga keuangan non bank membantu meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana di dalam perekonomian. Selain itu, lembaga ini juga mendukung pertumbuhan berbagai sektor usaha melalui penyediaan pembiayaan serta layanan keuangan lainnya. Menurut Martono

[13] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2021.
[14] Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter Dan Perbankan*.

dan Harjito**,** lembaga keuangan non bank berperan dalam menyediakan berbagai layanan keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat maupun pelaku usaha memperoleh sumber pembiayaan selain dari lembaga perbankan.[15] Lembaga ini juga berfungsi sebagai perantara keuangan yang membantu memperlancar peredaran dana dalam perekonomian, sehingga dapat mendorong kegiatan investasi maupun konsumsi masyarakat.

Berdasarkan pendapat Kasmir, Dahlan Siamat, dan Martono dan Harjito, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan non bank memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Peran tersebut terlihat dari fungsinya sebagai lembaga perantara yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Selain itu, lembaga keuangan non bank juga berperan dalam menyediakan berbagai layanan jasa keuangan yang dapat membantu kelancaran kegiatan usaha, meningkatkan efektivitas penyaluran dana dalam perekonomian, serta mendorong pertumbuhan kegiatan investasi dan konsumsi masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan non bank, masyarakat dan pelaku usaha memiliki pilihan sumber pembiayaan selain perbankan yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Indikator peran lembaga keuangan non bank menurut Kasmir[16], sebagai berikut:

---

[15] Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010).
[16] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat

   Lembaga keuangan non bank memiliki peran dalam mengumpulkan dana dari masyarakat melalui berbagai bentuk, seperti premi, simpanan tertentu, maupun investasi lainnya. Kemampuan dalam menghimpun dana menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

2. Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat

   Dana yang berhasil dihimpun selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Penyaluran dana ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan serta mendukung kegiatan usaha.

3. Menyediakan berbagai macam jasa keuangan

   Lembaga keuangan non bank menyediakan beragam layanan jasa keuangan, seperti pembiayaan, asuransi, leasing, maupun layanan investasi. Ketersediaan layanan yang beragam dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka.

4. Mendukung pengembangan UMKM

   Lembaga keuangan non bank juga berperan dalam membantu perkembangan usaha masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui pemberian pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

5. Berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat

   Peran lembaga keuangan non bank dapat dilihat dari kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses pembiayaan dan layanan keuangan yang memadai.

6. Efisiensi penyaluran dana

   Lembaga keuangan non bank memiliki peran dalam membantu menyalurkan dana secara lebih efektif dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

7. Memperluas akses pembiayaan

   Kemampuan lembaga dalam memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

B. Perilaku Nasabah Pembiayaan

Perilaku nasabah pembiayaan memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian dan lembaga keuangan karena memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan, baik secara individu maupun kelompok, dalam memilih dan menggunakan produk pembiayaan. Nasabah pembiayaan pada dasarnya merupakan konsumen jasa keuangan, sehingga konsep perilaku konsumen dapat digunakan untuk memahami bagaimana nasabah mengambil keputusan dalam menggunakan layanan pembiayaan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, perilaku konsumen adalah studi mengenai bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, serta menggunakan

ide, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Konsep ini relevan dalam memahami perilaku nasabah dalam menentukan pilihan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.[17]

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan pembiayaan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk pembiayaan dan kondisi yang dihadapi oleh nasabah. Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan tersebut antara lain faktor sosial, tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan, promosi atau periklanan, budaya, serta manfaat atau kegunaan pembiayaan yang ditawarkan. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membentuk persepsi nasabah sebelum memutuskan untuk menggunakan suatu produk pembiayaan.

Menurut Sujan, teori kepribadian juga memengaruhi perilaku konsumen yang dalam hal ini dapat diterapkan pada perilaku nasabah pembiayaan. Teori kepribadian menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian individu. Karakteristik tersebut dapat memengaruhi tingkat loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan, keputusan dalam menggunakan produk pembiayaan, serta kecenderungan dalam memilih jenis pembiayaan tertentu.[18] Selain faktor kepribadian, Sujan juga menyatakan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku konsumen maupun nasabah pembiayaan. Teori motivasi berfokus pada faktor-faktor psikologis dasar yang mendorong seseorang untuk bertindak. Teori ini menjelaskan bahwa

[17] Frans Sudirjo et al., *TEORI PERILAKU KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN*, ed. Andi Asari (Kota Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024).

[18] Sudirjo et al.

berbagai kebutuhan nasabah, seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan diri, hingga aktualisasi diri, menjadi pendorong utama dalam memengaruhi perilaku nasabah dalam mengambil keputusan pembiayaan.[19]

Indikator perilaku nasabah pembiayaan menggambarkan serangkaian tahapan yang dilalui nasabah dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari munculnya kebutuhan akan pembiayaan hingga evaluasi setelah pembiayaan digunakan. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan terdiri atas beberapa langkah yang saling berkaitan.[20]

1. Pengenalan kebutuhan, yaitu kondisi ketika nasabah menyadari adanya kebutuhan akan dana untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan lainnya.
2. Pencarian informasi, yaitu proses ketika nasabah berusaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari pengalaman pribadi, rekomendasi dari orang lain, maupun media informasi yang tersedia.
3. Evaluasi alternatif, proses ketika nasabah membandingkan beberapa pilihan produk pembiayaan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti jumlah pembiayaan, jangka waktu, biaya yang dikenakan, serta kemudahan prosedur.

[19] Sudirjo et al.
[20] Sudirjo et al.

4. Keputusan pembelian, yaitu tahap ketika nasabah memutuskan untuk memilih dan menggunakan produk pembiayaan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya.
5. Perilaku setelah pembiayaan, yaitu proses ketika nasabah mengevaluasi tingkat kepuasan terhadap layanan pembiayaan yang telah digunakan. Hasil evaluasi tersebut dapat memengaruhi tingkat loyalitas nasabah serta kemungkinan untuk kembali menggunakan pembiayaan di masa mendatang.

C. SOP Pembiayaan

SOP pembiayaan pada dasarnya merupakan pedoman kerja yang menjadi acuan dalam mengatur seluruh rangkaian proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah, mulai dari tahap awal pengajuan hingga pembiayaan tersebut dilunasi. Dalam praktiknya, SOP ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai pengarah agar setiap proses pembiayaan berjalan secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan.

Menurut Rivai dan Veithzal, SOP pembiayaan merupakan seperangkat prosedur yang disusun secara sistematis dalam proses penyaluran dana kepada nasabah. Penyusunan prosedur ini bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan serta memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).[21] Dengan adanya SOP yang jelas, lembaga keuangan dapat

[21] Arviyan Rivai, Veithzal, & Arifin, *Commercial Bank Management*: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat, terkontrol, dan terhindar dari potensi pembiayaan bermasalah.

Kasmir menjelaskan bahwa SOP pembiayaan merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan, yang mencakup pengajuan, analisis, persetujuan, pencairan, hingga pelunasan.[22] Setiap tahapan tersebut disusun secara berurutan agar proses pembiayaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan maupun terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Sementara itu, menurut Dendawijaya, prosedur pembiayaan adalah serangkaian langkah operasional yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada nasabah, mencakup proses penilaian kelayakan usaha serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang diterima.[23] Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan berada pada tingkat keamanan yang baik, sekaligus menjaga stabilitas dan kesehatan lembaga keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa SOP pembiayaan merupakan pedoman kerja yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam seluruh proses penyaluran dana kepada nasabah, yang mencakup tahapan pengajuan, analisis, persetujuan, pencairan, hingga pelunasan pembiayaan. SOP ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis operasional, tetapi juga sebagai instrumen penting

[22] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*.
[23] Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

dalam menjaga keteraturan, efektivitas, dan efisiensi proses pembiayaan dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian (prudential principle) untuk meminimalkan risiko. Selain itu, SOP pembiayaan berperan dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat serta membantu mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga pada akhirnya mendukung stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan operasional lembaga keuangan secara keseluruhan.

Indikator SOP pembiayaan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana penerapan SOP dalam proses pembiayaan telah berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga keuangan. Melalui indikator ini, lembaga dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pembiayaan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan atau masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam implementasinya. Menurut Tambunan, indikator SOP dalam suatu organisasi, termasuk dalam proses pembiayaan, mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaannya, yaitu[24]:

1. Kejelasan prosedur pembiayaan, yaitu sejauh mana setiap tahapan dalam SOP dirumuskan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan ini sangat penting karena dapat mengurangi potensi kesalahan serta menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan.

[24] Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)* (Jakarta: Maistas Publishing, 2013).

2. Konsistensi pelaksanaan prosedur, yang menunjukkan bahwa setiap proses pembiayaan harus dijalankan dengan cara yang sama sesuai standar yang telah ditetapkan, tanpa adanya perbedaan perlakuan antar nasabah maupun antar petugas. Hal ini mencerminkan bahwa SOP benar-benar diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya sebagai formalitas administratif.
3. Kepatuhan terhadap prosedur, yaitu tingkat kedisiplinan pihak yang terlibat dalam menjalankan seluruh ketentuan yang terdapat dalam SOP. Kepatuhan ini menjadi faktor penting, karena meskipun SOP telah disusun dengan baik, tanpa pelaksanaan yang disiplin maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai secara optimal.
4. Efektivitas pelaksanaan prosedur, yang menggambarkan sejauh mana SOP mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti kelancaran proses pembiayaan, ketepatan penyaluran dana, serta minimnya risiko pembiayaan bermasalah. Semakin efektif SOP diterapkan, maka semakin baik pula kualitas proses pembiayaan dalam lembaga keuangan tersebut.
5. Efisiensi waktu pelaksanaan, yaitu kemampuan SOP dalam mengatur proses pembiayaan agar dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas analisis maupun pelayanan kepada nasabah. Efisiensi ini penting agar proses pembiayaan tidak berlangsung berbelit-belit dan tetap memberikan kemudahan bagi nasabah.

6. Ketepatan dokumentasi, yang berkaitan dengan kelengkapan, ketelitian, dan keakuratan seluruh data serta dokumen yang digunakan dalam proses pembiayaan. Dokumentasi yang baik akan mendukung proses pengawasan, evaluasi, serta menjadi bukti administratif yang sah dalam setiap kegiatan pembiayaan.

Dengan demikian, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa SOP pembiayaan bukan hanya sekadar pedoman tertulis, tetapi merupakan sistem kerja yang harus diterapkan secara konsisten, disiplin, dan terukur guna mendukung kelancaran serta keamanan proses pembiayaan dalam lembaga keuangan.

Berdasarkan beberapa teori SOP pembiayaan yang telah dijelaskan, teori SOP pembiayaan menurut Kasmir dinilai paling sesuai digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan tahapan pembiayaan secara sistematis, mulai dari pengajuan, analisis, persetujuan, pencairan, hingga pelunasan pembiayaan, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai efektivitas SOP pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap pengembangan UMKM di KJKS BMT Agam Madani. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan indikator SOP menurut Tambunan, namun tidak seluruh indikator digunakan karena disesuaikan dengan fokus penelitian. Indikator yang digunakan meliputi kejelasan prosedur pembiayaan, efektivitas pelaksanaan prosedur, dan efisiensi waktu pelaksanaan.

D. Efektivitas Pelaksanaan SOP

Setiap organisasi memerlukan pedoman kerja yang tersusun secara jelas agar seluruh kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara teratur dan konsisten. Pedoman kerja tersebut dikenal dengan istilah *Standard Operating Procedure* (SOP). Menurut Tambunan, SOP adalah sebuah pedoman atau panduan tertulis yang memuat langkah-langkah kerja standar dalam suatu organisasi. SOP digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, tindakan, serta penggunaan fasilitas kerja dilakukan oleh anggota organisasi secara tepat, sehingga kegiatan organisasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, konsisten, teratur, dan sistematis.[25]

Selain berfungsi sebagai pedoman kerja, SOP juga bertujuan untuk meningkatkan mutu kinerja dalam suatu organisasi. Dengan diterapkannya SOP, setiap tugas dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan sehingga dapat mengurangi kesalahan serta meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Di samping itu, SOP juga berperan dalam menciptakan keseragaman pelaksanaan tugas, memudahkan kegiatan pengawasan, serta menjadi pedoman dalam proses pelatihan bagi anggota organisasi yang baru. Oleh karena itu, penerapan SOP yang tepat sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran serta keberhasilan kegiatan organisasi. Indikator SOP menurut Santoso, yaitu: efisiensi, konsistensi, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga kerja, peta kerja, dan batasan pertahanan.[26]

1. Efisiensi

[25] Tambunan.

[26] Santoso, *Lebih Memahami SPO Standard Operating Procedure* (Surabaya: Kata Pena, 2014).

Efisiensi berkaitan dengan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan secara tepat dan cepat. Tujuan utamanya adalah agar setiap kegiatan kerja dapat diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, teliti, serta selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Konsistensi

Konsistensi merupakan keadaan tetap atau stabil dalam pelaksanaan tugas. Hal ini penting karena kondisi yang stabil akan mempermudah perusahaan dalam menilai serta menghitung keuntungan maupun kerugian yang terjadi. Untuk mencapai konsistensi tersebut, diperlukan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Penerapan SOP yang dilakukan secara tepat dan berkesinambungan akan memberikan dampak yang positif bagi organisasi.

3. Minimalisasi Kesalahan

SOP berperan sebagai pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tujuan dari penerapan SOP adalah untuk meminimalkan kesalahan yang dapat menimbulkan dampak serius serta merugikan perusahaan. Dengan adanya SOP, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan di dalam organisasi dapat dihindari.

4. Penyelesaian Masalah

SOP merupakan alat yang memberikan pemahaman mengenai persyaratan dalam bekerja serta membantu dalam mengenali kemungkinan terjadinya masalah. Selain itu, SOP juga berperan dalam membantu menyelesaikan konflik antarpekerja dengan mengarahkan mereka untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan kembali melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman yang berlaku.

5. Perlindungan Tenaga Kerja

SOP berisi tahapan-tahapan kerja yang bertujuan untuk melindungi karyawan dari kesalahan administratif maupun faktor lain yang berpotensi merugikan organisasi. Selain itu, SOP juga berperan dalam menjaga hak-hak karyawan serta menjadi standar yang digunakan untuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan pekerjaan.

6. Peta Kerja

Peta kerja merupakan suatu pola yang mengatur seluruh aktivitas secara terstruktur dan sistematis, sehingga alur kerja setiap karyawan menjadi lebih jelas dan mereka dapat bekerja dengan lebih terarah. Peta kerja memiliki keterkaitan erat dengan efisiensi dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya peta kerja yang jelas, koordinasi, komunikasi, serta proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih baik, terutama dalam situasi kerja yang berpotensi menimbulkan tekanan atau stres.

7. Batasan Pertahanan

SOP berfungsi sebagai benteng pertahanan yang kuat karena seluruh aktivitas perusahaan telah dijelaskan secara rinci di dalam prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, pemeriksaan dari pihak eksternal tidak akan mudah mengubah isi prosedur maupun melemahkan kestabilan perusahaan.

Teori Efektivitas menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.[27] Dengan kata lain, suatu kegiatan atau program dapat dianggap efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas organisasi.

Kriteria efektivitas diperlukan dalam pengembangan organisasi maupun individu. Umumnya, kriteria efektivitas dinyatakan berdasarkan rentang waktu, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Kriteria jangka pendek digunakan untuk menilai kegiatan yang menghasilkan capaian dalam waktu kurang dari satu tahun. Kriteria jangka menengah diterapkan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dalam periode waktu yang lebih lama, misalnya sekitar lima tahun. Sementara itu, kriteria jangka panjang digunakan untuk menilai pencapaian di masa depan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

[27] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2017).

Menurut Gibson dalam Ade Risna Sari, keefektifan dapat diukur melalui[28]:

1. Keefektifan Produksi, Menunjukkan tingkat kemampuan organisasi dalam memproduksi hasil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya.
2. Efisiensi, Dimaknai sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan. Pada kriteria jangka pendek, perhatian utama diberikan pada keseluruhan siklus yang meliputi masukan, proses, dan keluaran, dengan penekanan khusus pada unsur masukan dan proses.

   Efisiensi diukur dengan melihat perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan bahan baku. Semakin kecil sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui:

   a. Perbandingan biaya operasional dengan hasil produksi.
   b. Tingkat penggunaan waktu kerja.
   c. Produktivitas karyawan.
   d. Rasio input dan output.
   e. Penghematan penggunaan sumber daya.

   Contoh indikator pengukuran:

   a. Persentase pengurangan biaya operasional.

[28] Ade Risna Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021).

b. Jumlah output per jam kerja.

c. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.[29]

3. Kepuasan, Kepuasan dan moral menjadi indikator yang menunjukkan sejauh mana organisasi atau perusahaan mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

   Kepuasan diukur berdasarkan tingkat terpenuhinya kebutuhan dan harapan pelanggan maupun anggota organisasi. Pengukuran biasanya dilakukan melalui survei atau kuesioner yang menggambarkan persepsi responden terhadap pelayanan atau kinerja organisasi.

   Indikator pengukurannya meliputi:

   a. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan.
   b. Loyalitas pelanggan.
   c. Keluhan atau komplain pelanggan.
   d. Tingkat kenyamanan dan kepercayaan pelanggan.
   e. Kepuasan kerja karyawan.

   Metode pengukuran:

   a. Skala Likert (1–5).
   b. Wawancara.
   c. Survei kepuasan pelanggan.[30]

4. Keadaptasian, menggambarkan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam menanggapi perubahan internal maupun eksternal dengan cepat dan tepat.

---

[29] James L Gibson, John M Ivancevich, and James H Donnelly, *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (McGraw-Hill, 1996).

[30] T Hani Handoko, *Organisasi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2003).

Keadaptasian diukur melalui kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, teknologi, maupun kebutuhan pasar. Semakin cepat organisasi merespons perubahan, maka semakin tinggi tingkat keadaptasiannya.

Indikator pengukuran:

a. Kecepatan organisasi dalam mengambil keputusan.
b. Kemampuan mengikuti perkembangan teknologi.
c. Inovasi produk atau layanan.
d. Fleksibilitas sistem kerja.
e. Kemampuan menghadapi persaingan.

Metode pengukuran:

a. Observasi perubahan kebijakan organisasi.
b. Evaluasi inovasi yang dilakukan.
c. Penilaian respon organisasi terhadap perubahan eksternal.[31]

5. Pengembangan, Menunjukkan tingkat kemampuan organisasi atau perusahaan dalam mengembangkan kapasitas untuk menghadapi berbagai tuntutan lingkungan. Dengan demikian, organisasi harus melakukan berbagai strategi dan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang.

   Pengembangan diukur dari kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sistem kerja, dan strategi organisasi untuk keberlangsungan jangka panjang.

[31] Daron Acemoglu and James A Robinson, *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty* (Penguin Press, 2019).

Indikator pengukuran:

a. Program pelatihan dan pengembangan SDM.
b. Peningkatan kompetensi karyawan.
c. Pengembangan teknologi dan sistem kerja.
d. Perencanaan strategis jangka panjang.
e. Kemampuan organisasi mempertahankan eksistensi.

Metode pengukuran:

a. Jumlah pelatihan yang dilakukan.
b. Tingkat peningkatan keterampilan karyawan.
c. Evaluasi pencapaian target pengembangan organisasi.
d. Pertumbuhan organisasi dari waktu ke waktu.

Secara umum, pengukuran efektivitas indikator-indikator tersebut dapat menggunakan:

a. Kuesioner atau angket.
b. Wawancara.
c. Observasi.
d. Dokumentasi dan laporan organisasi.
e. Analisis rasio kinerja organisasi.

Biasanya dalam penelitian, indikator-indikator tersebut dijadikan pernyataan dalam instrumen penelitian menggunakan skala Likert, misalnya:

a. Sangat Setuju (5)
b. Setuju (4)
c. Netral (3)

d. Tidak Setuju (2)

e. Sangat Tidak Setuju (1)[32]

Dalam menentukan tingkat efektivitas organisasi, diperlukan indikator yang tegas sebagai dasar evaluasi. Menurut Tangkilisan dalam Aswar Annas, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas organisasi.[33]

1. Pencapaian Target, sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat diukur dari sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi mampu mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Kemampuan Adaptasi, Tingkat keberhasilan organisasi dapat dinilai dari sejauh mana organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.
3. Kepuasan kerja, Berfokus pada kesesuaian antara pemberian penghargaan kinerja atau sistem insentif kepada anggota organisasi yang menunjukkan prestasi dan mampu melaksanakan pekerjaan melebihi beban tugas yang dimiliki saat ini.
4. Tanggung jawab, Organisasi dapat menjalankan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta

[32] Edgar H Schein, *Organizational Psychology* (New Jersey: Prentice Hall, 1980).

[33] Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan* (makassar: Celebes Media Perkasa, 2017).

mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses kerja berlangsung.

Berdasarkan beberapa teori efektivitas yang telah dijelaskan, teori efektivitas organisasi menurut Gibson dinilai paling sesuai digunakan dalam penelitian ini karena indikatornya berkaitan dengan pelaksanaan *Standard Operating Procedure* (SOP) pembiayaan serta dampaknya terhadap pelayanan dan pengembangan UMKM. Menurut Gibson, efektivitas organisasi diukur melalui keefektifan produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Namun, penelitian ini hanya menggunakan indikator efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

Indikator efisiensi digunakan untuk melihat kelancaran proses pembiayaan BBA, indikator kepuasan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan, indikator keadaptasian untuk menilai kemampuan lembaga dalam menyesuaikan SOP dengan kebutuhan nasabah UMKM, serta indikator pengembangan untuk melihat pengaruh pembiayaan BBA terhadap perkembangan usaha nasabah.

E. Akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Bai' Bithaman Ajil (BBA) berasal dari tiga kata utama, yaitu *bai'* yang berarti transaksi jual beli, *tsaman* yang berarti harga, dan *ajil* yang mengandung makna penundaan pembayaran atau dilakukan secara bertahap.[34] Konsep ini merupakan bentuk pengembangan dari akad murabahah. Dengan demikian, *bai' bitsaman ajil* dapat dipahami sebagai

[34] Muhammad, "Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2000) Hal 119," 2000, 15–39.

akad jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tidak tunai, melainkan melalui sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' bitsaman ajil* merupakan bentuk pembiayaan berbasis akad jual beli yang melibatkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.[35] Dalam hal ini, bank menyediakan dana untuk kebutuhan investasi atau pembelian barang, sedangkan nasabah melakukan pembayaran kembali secara bertahap melalui sistem angsuran dalam periode yang telah ditentukan. Menurut Ascarya, dalam akad ini lembaga keuangan syariah berperan sebagai penjual yang menyediakan barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga jual yang telah disepakati di awal.[36] Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sementara itu, menurut Karim, akad BBA merupakan pembiayaan berbasis jual beli yang menekankan pada prinsip transparansi dalam penetapan harga sejak awal akad.[37] Keuntungan yang diperoleh pihak bank telah disepakati dalam bentuk margin yang jelas, sehingga akad ini terhindar dari unsur riba karena seluruh ketentuan harga dan pembayaran telah ditentukan secara terbuka dan disetujui oleh kedua pihak sejak awal transaksi.

Pada prinsipnya, setiap kegiatan jual beli harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat agar dapat dinyatakan sah secara syariah. Hal ini juga berlaku dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil*, di mana keabsahan akad tersebut

---

[35] Muhammad.

[36] Ascarya Hal, *Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hal 192-194*, 2008.

[37] A. A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang berlaku. Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli meliputi empat komponen utama, yaitu:

1. Ada pembeli dan penjual
2. Ada sighat (*ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang diperjual belikan
4. Ada alat tukar nilai barang

Perbedaan antara *bai' bitsaman ajil* dan murabahah dapat dipahami melalui karakteristik pembayarannya.[38] *Bai' bitsaman ajil* merupakan bentuk pembiayaan jual beli di mana pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, dengan jumlah yang harus dibayarkan meliputi harga barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, nasabah melunasi kewajibannya secara bertahap. Di sisi lain, murabahah merupakan akad jual beli yang mengharuskan pembayaran dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo dalam satu kali pelunasan, termasuk margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *bai' bitsaman ajil* (BBA) merupakan akad pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbasis jual beli, di mana bank bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang atau dana sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati sejak awal termasuk margin keuntungan. Pembayaran dalam akad BBA dilakukan

[38] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hal 192-194.*

secara bertahap atau angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Indikator dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting yang menunjukkan bahwa proses jual beli secara tangguh telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

1. Kejelasan harga pokok dan margin keuntungan. Dalam praktik akad BBA, keterbukaan mengenai harga merupakan hal yang sangat penting karena lembaga keuangan harus menjelaskan secara jujur kepada nasabah mengenai harga pokok barang yang dibiayai serta besarnya margin keuntungan yang ditetapkan.[39] Kejelasan ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai harga dasar barang, penentuan margin yang telah disepakati bersama, kesepakatan harga jual sejak awal akad dilakukan, serta adanya kepastian bahwa harga tersebut tetap dan tidak berubah selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan adanya keterbukaan harga tersebut, nasabah akan lebih mudah memahami jumlah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi hingga akhir masa pembiayaan.
2. Kejelasan objek akad atau barang yang menjadi objek pembiayaan. Dalam akad BBA, barang yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan dari segi jenis, kualitas, serta spesifikasinya.[40] Nasabah perlu mengetahui secara rinci kondisi barang yang akan dibeli agar tidak menimbulkan

[39] Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik.
[40] Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

kesalahpahaman di masa mendatang. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kejelasan terhadap objek akad ini sangat penting untuk menjamin keabsahan akad serta menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak.

3. Kejelasan jangka waktu pembayaran. Pada akad BBA, pembayaran dilakukan secara tangguh atau dicicil dalam periode tertentu yang telah disepakati bersama.[41] Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang jelas mengenai lamanya waktu pembiayaan, jadwal pembayaran angsuran, serta besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah secara tetap. Selain itu, ketentuan yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran juga perlu disampaikan secara jelas sejak awal, sehingga nasabah memahami konsekuensi yang mungkin timbul apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Kejelasan mengenai jangka waktu pembayaran ini akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua belah pihak dalam menjalankan kewajibannya.
4. Prosedur pelaksanaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan akad BBA harus memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana diatur dalam hukum syariah, seperti adanya *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan antara pihak lembaga

[41] Karim.

keuangan dan nasabah.[42] Selain itu, akad harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam praktiknya, akad biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa akad yang dilaksanakan tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *maisir* (unsur spekulasi), sehingga pelaksanaan pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Mekanisme penyerahan barang kepada nasabah. Dalam akad BBA, barang yang telah disepakati harus diserahkan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sejak awal.[43] Waktu penyerahan barang perlu ditentukan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Setelah barang diserahkan, hak kepemilikan barang tersebut berpindah kepada nasabah secara sah, dan tanggung jawab atas barang tersebut juga beralih kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

F. Pengembangan UMKM

Dalam dinamika pembangunan ekonomi nasional, keberadaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis yang krusial sebagai penggerak utama ekspansi ekonomi

[42] Hal, *Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hal 192-194.*

[43] Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*.

dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai pilar fundamental ekonomi kerakyatan, UMKM memberikan kontribusi ganda yang sangat signifikan: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, dan di sisi lain memperkokoh fondasi ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi turbulensi dan ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang.

Churchill dan Lewis mengemukakan Teori Siklus Pertumbuhan Perusahaan (*Firm Growth Cycle Theory*), menyatakan bahwa evolusi UMKM mengikuti pola siklus pertumbuhan organisasi bisnis yang terdiri dari empat tahapan: fase awal atau perintisan (*start-up*), fase pertumbuhan yang ditandai dengan ekspansi (*growth*), fase konsolidasi sebagai periode pemantapan, dan fase stabilisasi sebagai tahap kematangan usaha.[44] Setiap fase dalam siklus tersebut menuntut pendekatan strategis yang berbeda dan spesifik, khususnya dalam hal permodalan, pengembangan inovasi, serta pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Teori Siklus Pertumbuhan Perusahaan menggambarkan bahwa perkembangan UMKM berlangsung melalui empat tahap utama, yaitu tahap perintisan (*start-up*), pertumbuhan (*growth*), konsolidasi, dan stabilisasi. Setiap tahap membutuhkan strategi yang berbeda, terutama dalam pengelolaan modal, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, pendekatan pengembangan UMKM berbasis ekosistem kolaboratif menyoroti pentingnya kerja sama antara berbagai pihak pemerintah sebagai fasilitator, lembaga keuangan sebagai penyedia

[44] Agus Wibowo et al., *Pengantar KEWIRAUSAHAAN* (Yogyakarta: Deepublish, 2020),54-55.

modal, masyarakat sebagai pengguna, dan pelaku usaha sebagai penggerak utama guna mewujudkan pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Munir, menjelaskan teori pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan dan penguatan potensi wilayah melalui tiga aspek utama, pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi daerah, kedua, pembinaan terhadap industri lokal sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat dan ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.[45]

Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat bergantung pada strategi pembangunan ekonomi lokal yang menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri lokal, dan pemanfaatan optimal sumber daya daerah. Ketiga aspek ini saling berkaitan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat lokal.

Menurut Pandji Anoraga**,** teori pengembangan usaha merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang wirausaha dalam mengelola dan memajukan bisnisnya. Pengembangan tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk atau layanan baru, peningkatan kualitas serta kuantitas produksi, dan perluasan

[45] Sishadiyati Mohammad Wahed, *Buku Monograf, Pengembangan Ekonomi Lokal*, vol. 4 (CV Mitra Abisatya, 2020).

skala usaha agar bisnis mampu bersaing dan bertahan secara berkelanjutan. Anoraga menegaskan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh inisiatif, motivasi, serta kemampuan manajerial wirausaha dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika pasar dan perubahan lingkungan bisnis.[46]

Pengembangan usaha merupakan tanggung jawab strategis seorang wirausaha dalam upaya memajukan dan mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Tanggung jawab tersebut tidak sekadar berfokus pada penyediaan modal, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berinovasi secara kreatif, menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan pasar, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar dapat bersaing secara efektif. Selain itu, wirausaha juga dituntut untuk memperluas jangkauan dan skala usahanya, baik melalui diversifikasi produk maupun penguatan jaringan pemasaran. Kesuksesan bisnis sangat bergantung pada inisiatif, semangat kewirausahaan, dan kemampuan manajerial pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan lingkungan ekonomi yang terus berkembang.

1. Kinerja dan kesehatan keuangan

   Mencakup berbagai aspek penting seperti peningkatan volume penjualan atau omzet usaha, pertumbuhan laba bersih setelah pajak, penguatan struktur modal kerja, serta kontribusi agregat terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Kenaikan pendapatan dan margin keuntungan yang signifikan

[46] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

setelah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan mikro atau kredit usaha menjadi ukuran konkret dan terukur dari keberhasilan pengembangan usaha di tingkat mikro.[47] Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap PDB merupakan indikator makroekonomi yang sangat signifikan dalam menilai peran strategis dan dampak sektor ini terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional secara keseluruhan.[48]

2. Kapasitas operasional dan tingkat produktivitas

Mengacu pada kemampuan UMKM dalam mengelola, mengalokasikan, dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia, permodalan, dan aset produktif usaha. Peningkatan kuantitas tenaga kerja yang terserap, pertambahan nilai aset produktif, dan penguatan modal sendiri atau ekuitas merupakan indikasi nyata dari ekspansi skala usaha dan peningkatan kapabilitas operasional yang berkelanjutan.[49] Tingkat literasi dan pemahaman keuangan pelaku usaha, serta kemampuan melakukan efisiensi struktur biaya operasional, juga menjadi faktor penentu utama bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan jangka

[47] Desy Wulan Rachmawati and Ach. Yasin, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 145–56.

[48] Lies Maria Hamza and Devi Agustien, "The Influence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises on National Income in the MSME Sector in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): 127–35.

[49] Endi Sarwoko, "227-Article Text-127-1-10-20140405," 2008, 172–88.

panjang UMKM, terutama di tengah intensitas persaingan pasar yang semakin ketat dan kompleks.[50]

3. Kapasitas inovasi dan daya saing kompetitif

Aspek krusial dan strategis dalam menghadapi perubahan teknologi dan dinamika pasar yang volatil. Kemampuan dalam menciptakan dan mengembangkan produk atau layanan baru yang unik, tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi digital dalam operasional bisnis, kepemilikan legalitas dan perizinan usaha yang lengkap, serta upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas produk dan standar layanan kepada konsumen.[51] Penerapan prinsip-prinsip *lean management* atau manajemen ramping dan optimalisasi efisiensi dalam proses produksi dapat secara signifikan memperkuat posisi daya saing UMKM, baik di tingkat pasar domestik, nasional, maupun dalam arena kompetisi global.[52]

Keberhasilan UMKM bergantung pada tiga faktor utama: kesehatan keuangan, efektivitas operasional dan produktivitas, kemampuan inovasi dan daya saing. Ketiga elemen ini harus bekerja secara sinergis untuk mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan

---

[50] Kadek Handayani, "Indikator Penting Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM," *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 8, no. 1 (2024): 1–13, https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.23983.

[51] Donald Crestofel Lantu et al., "Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM Di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model," *Jurnal Manajemen Teknologi* 15, no. 1 (2016): 77–93, https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.1.6.

[52] David Dwi Harjanto and Putu Dana Karningsih, "Development of Lean Assessment Tools Dimensions and Indicators For SMEs in Indonesia," *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)* 5, no. 1 (2021): 21–29, https://doi.org/10.21070/prozima.v5i1.1426.

efisiensi operasional, dan memperkuat posisi UMKM dalam persaingan di tingkat domestik maupun global.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berisi tentang kajian atau pembahasan sebelumnya yang pernah ditulis oleh peneliti atau ilmuan yang sudah terakreditasi. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai penelitian ini, peneliti melakukan telaah pustaka terhadap karya-karya peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dilakukan dengan memperhatikan skripsi dan jurnal terkait untuk memperkaya isi tulisan dan sebagai referensi dari peneliti sebelum nya dengan topik yang sama, seperti :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Kajian Terdahulu	Hasil Kajian Terdahulu
1.	Rifqi Nurdiansyah *dkk.*	Pelaksanaan Akad *Bai' Bitsaman Ajil* dalam Tinjauan Hukum islam (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri)"	Memperlihatkan bahwa akad BBA di BMT UGT Sidogiri memerlukan tambahan akad *wakalah*. Terdapat dua bentuk pelaksanaan akad, yaitu: 1. Model pertama, nasabah bertindak sebagai wakil yang menyerahkan barang terlebih dahulu kepada BMT, kemudian diserahkan kembali kepada nasabah. Cara ini dianggap sah menurut hukum Islam. 2. Model kedua, nasabah langsung membawa pulang barang tanpa adanya penyerahan terlebih dahulu kepada BMT, yang dinilai tidak sah

			karena menimbulkan *ittihadul qaabit wal muqbit*, yaitu kondisi ketika pihak penerima dan pemberi barang adalah orang yang sama, yang dilarang dalam hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA) sangat penting untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah dan mencegah pelanggaran dalam pelaksanaannya. Efektivitas SOP terbukti mampu meningkatkan kepercayaan nasabah, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, melalui sistem pembiayaan yang adil, etis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.[53]
2.	Susiana Puji Rahayu *dkk.*	Analisis Perkembangan UMKM pada Pembiayaan Al-Bai' Bitsaman Ajil (BBA) pada Usaha Produktif (Studi Kasus pada UMKM Nasabah dari BMT-Maslahah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo)	bertujuan untuk menilai sejauh mana pembiayaan *Al-Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) dapat meningkatkan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menunjukkan bahwa pembiayaan BBA yang disalurkan oleh BMT-Maslahah Sidogiri efektif dalam meningkatkan pendapatan, memperluas skala usaha, dan memperkuat daya saing UMKM. Dengan demikian, pembiayaan berbasis prinsip syariah ini memiliki peran penting dalam mendorong

[53] Rifqi Nurdiansyah et al., "Pelaksanaan Akad Bai` Bitsaman Ajil Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Bmt Sidogiri)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 327–34, https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7420.

			pertumbuhan ekonomi masyarakat. [54]
3.	Arrizqah Bariroh	Strategi Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BMT dalam pengembangan UMKM dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu komunikasi, pengembangan, dan pengawasan. Pada aspek komunikasi, BMT menjalin hubungan aktif dengan masyarakat melalui sosialisasi, pengajian, dan media publikasi untuk memperkenalkan produk pembiayaan syariah. Pada aspek pengembangan, BMT memberikan pelatihan dan pendampingan usaha agar pelaku UMKM mampu meningkatkan manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Sedangkan pada aspek pengawasan, BMT melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip syariah. [55]
4.	Purnoto dan Danang Dwi Prasetyo	Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus di BMT Ya Ummi Fatimah Pati)	hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad BBA belum sepenuhnya sesuai syariat Islam. Dalam praktiknya, pembiayaan diberikan dalam bentuk uang tunai tanpa adanya proses jual beli barang secara nyata, serta terdapat akad ganda yang menjadikan transaksi lebih menyerupai *rahn* (gadai)

[54] Susiana Puji Rahayu et al., "Analisis Perkembangan UMKM Pada Pembiayaan Al-Bai ' Bitsaman Ajil (BBA) Pada Usaha Produktif (Studi Kasus Pada UMKM Nasabah Dari BMT-Maslahah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo) (A Nalysis Of SMEs Development in Al-Bai ' Bitsaman Ajil (BBA) Financing ," 2012.

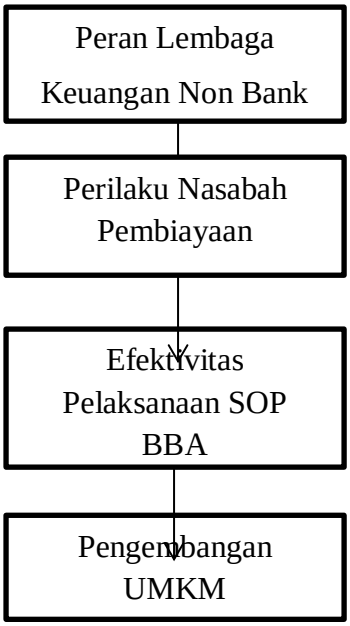
[55] Arrizqah Bariroh, "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Istithmar* 7, no. 1 (2023): 23–33, https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205.

			daripada jual beli tangguh. Kondisi ini menimbulkan potensi *riba terselubung* karena tidak terjadi serah terima barang sebagaimana rukun jual beli. Penelitian menyarankan agar BMT memperbaiki mekanisme akad dengan menerapkan akad *wakalah* dan menyusun SOP berbasis syariah guna menjaga keaslian akad BBA, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperkuat peran pembiayaan syariah dalam pengembangan usaha mikro. [56]
5.	oleh Dwi Purnamasari dan Abdullah Salam	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penelitian ini menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM**.** Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT mampu membantu peningkatan omzet, jumlah pelanggan, dan produktivitas usaha anggota. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja dan keberhasilan UMKM**,** melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.[57]

[56] Purnoto and Danang Dwi Prasetyo, "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati)," *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2020): 73–90, https://doi.org/10.54396/qlb.v1i1.109.

[57] Dwi purnamasari & Abdullah Salam, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 2, no. 1 (2019): 133–46.

H. Kerangka Konseptual



Lembaga keuangan non bank memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penyedia layanan pembiayaan yang berperan dalam mendukung aktivitas usaha masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan dana serta berbagai layanan jasa keuangan yang memadai. Keberadaan lembaga keuangan non bank menjadi salah satu faktor yang membantu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha serta menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Selain peran lembaga keuangan, perilaku nasabah pembiayaan juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembiayaan. Keputusan nasabah dalam memilih dan menggunakan produk pembiayaan umumnya dipengaruhi oleh kebutuhan yang dimiliki, informasi yang diperoleh, serta pandangan atau persepsi terhadap lembaga keuangan yang digunakan. Perilaku nasabah yang baik, seperti disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta penggunaan dana sesuai dengan

tujuan pembiayaan, dapat membantu memperlancar proses pembiayaan sekaligus meningkatkan keberhasilan pemanfaatan dana dalam kegiatan usaha.

Di samping itu, SOP pembiayaan memiliki peranan penting sebagai pedoman utama dalam menjalankan proses pembiayaan agar berlangsung secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Dalam pelaksanaannya, SOP pembiayaan harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam akad Bai' Bitsaman Ajil (BBA), yang menekankan adanya keterbukaan dalam penetapan harga, kesepakatan margin keuntungan di awal, serta sistem pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian antara SOP pembiayaan dan ketentuan akad BBA menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga ketertiban serta keamanan dalam pelaksanaan pembiayaan. Penerapan SOP pembiayaan yang berjalan secara efektif dalam akad BBA diharapkan dapat memperlancar proses pembiayaan, mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha nasabah.

Oleh karena itu, hubungan antar variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan SOP pembiayaan BBA dipengaruhi oleh peran lembaga keuangan non bank dan perilaku nasabah pembiayaan, yang selanjutnya memberikan pengaruh terhadap pengembangan UMKM sebagai tujuan utama dari pelaksanaan pembiayaan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan efektivitas pembiayaan lembaga keuangan non-bank dalam pengembangan UMKM, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami fenomena pada kondisi yang alamiah. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan bertujuan memahami makna di balik fenomena yang terjadi.[58] Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman informan secara langsung sesuai konteks lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena BMT tersebut aktif menyalurkan pembiayaan berbasis akad *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*. Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama lima bulan, yaitu mulai dari Oktober 2025 hingga Februari 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian.

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono, sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan untuk mendukung kelengkapan informasi dalam penelitian.[59]

1. Data primer: data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan pengurus BMT serta nasabah pembiayaan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Data sekunder: Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen lembaga, laporan tahunan BMT, data terkait pembiayaan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer yang telah diperoleh di lapangan.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan

[59] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019).

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan memilih informan yang dinilai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang relevan terhadap informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.[60]

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka secara langsung dalam kegiatan pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan. Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Manajer dan staf pembiayaan BMT Agam Madani, yang memahami kebijakan dan mekanisme penyaluran pembiayaan.
2. Nasabah atau pelaku UMKM penerima pembiayaan, yang dapat memberikan informasi mengenai dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha mereka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1. Wawancara dengan informan.
2. Observasi langsung terhadap kegiatan operasional BMT dan aktivitas usaha nasabah untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan.
3. Dokumentasi**,** berupa pengumpulan data tertulis seperti laporan keuangan dan catatan pembiayaan.

[60] Sugiyono.

F. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi data: proses memilah, menyeleksi, dan memfokuskan data penting sesuai tujuan penelitian.
2. Penyajian data**:** dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel.
3. Penarikan kesimpulan**:** proses memberikan penjelasan data untuk memperoleh temuan yang valid dan mendalam mengenai efektivitas pembiayaan lembaga non-bank terhadap pengembangan UMKM.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data di lapangan sehingga informasi yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen utama karena terlibat secara langsung dalam mengumpulkan data serta memahami kondisi yang terjadi di lapangan.[61] Selain itu, dalam pelaksanaannya juga digunakan instrumen pendukung untuk membantu memperoleh data yang lebih lengkap, sistematis, dan akurat. Dalam penelitian ini, instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

wawancara, pedoman observasi, serta dokumentasi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang resmi didirikan pada tanggal 21 Januari 2008 dengan nomor badan hukum 154/BH/DKPP/P1/1/2008. Pendirian lembaga ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Kabupaten Agam di bawah kepemimpinan Bupati Aristo Munandar, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Pada tahap awal operasionalnya, KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan mengelola modal awal sebesar Rp323.600.000. Modal awal tersebut berasal dari beberapa sumber pendanaan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Modal Awal BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

Keterangan	Jumlah
Penyertaan PEMDA	Rp. 300.000.000
Penyertaan Pinbuk Dalam Bentuk *Software*	Rp. 7.500.000
Hibah Komputer Dari Pemda	Rp. 7.600.000
Hibah Dana PKL	Rp. 8.500.000
Jumlah	**Rp. 323.600.000**

Modal awal tersebut menjadi sumber pendanaan utama bagi BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah di bawah otoritas

Nagari Pakan Sinayan. Dana tersebut juga menjadi fondasi awal dalam pengembangan sistem keuangan syariah serta menandai pelaksanaan tahap ketiga dari proses pendirian BMT di wilayah Kabupaten Agam. Saat ini, jumlah pendiri BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan tercatat sebanyak 55 orang, dengan total aset yang telah mencapai lebih dari Rp2.000.000.000. Pencapaian ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan sejak lembaga ini pertama kali didirikan.

2. Visi Dan Misi KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

a. Visi

Visi KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang menjunjung tinggi prinsip amanah dan profesionalisme, serta menjadi institusi yang unggul dalam kinerja. Lembaga ini diarahkan untuk menjadi entitas yang mandiri, sehat, dan kuat, serta mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya. Selain itu, peningkatan kualitas tersebut diharapkan dapat mendorong anggota untuk menjadi individu yang berperan aktif dalam memakmurkan kehidupan masyarakat secara luas, dengan landasan keikhlasan dalam mengharapkan ridha Allah SWT.

b. Misi

Adapun misi KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah dan profesional, serta menjalankan peran strategis sebagai

gerakan pembebasan bagi anggota dan masyarakat dari ketergantungan terhadap praktik rentenir dan jeratan kemiskinan.

3. Struktur Organisasi KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

Struktur organisasi pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan terdiri dari unsur pengawas nagari, rapat anggota tahunan (RAT), manajer, serta bagian operasional. Adapun susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a) Nagari

1. Ketua: Anton, S.H Dt Bajuangguik Ameh.
2. Anggota: Hj. Mardiani B dan Rismala Dewi.

b) Rapat Anggota Tahunan (RAT)

1. Ketua: Irdawati.
2. Wakil Ketua: Taslim Dt Rajo Endah Nan Kuniang.
3. Sekretaris: H. Asrar St. Sulaiman.

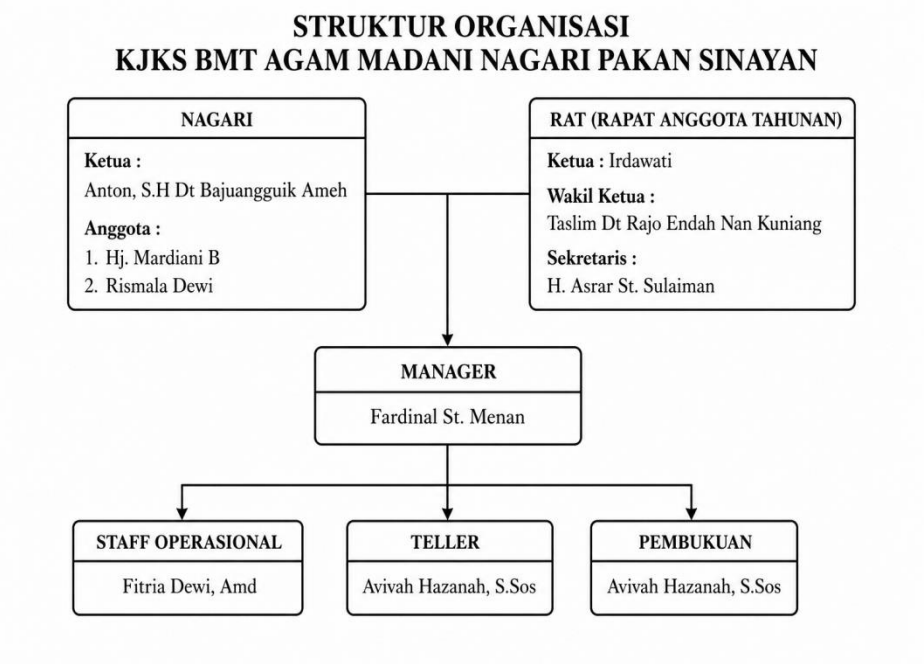
c) Manajer

Manager: Fardinal St. Menan

d) Bagian Operasional

Di bawah pimpinan manajer terdapat beberapa bagian operasional yang bertugas dalam kegiatan administrasi dan pelayanan kepada anggota, yaitu:

1. Staff Operasional**:** Fitria Dewi, Amd
2. Teller: Avivah Hazanah, S.Sos
3. Pembukuan: Avivah Hazanah, S.Sos



4. Jenis-Jenis Produk BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

Produk yang ditawarkan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan terdiri dari produk tabungan dan pembiayaan.

a) Produk Tabungan

1. Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA)

   Yaitu jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat.

2. Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

   Yaitu jenis tabungan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengembaliannya menjelang ingin digunakan, atau awal tahun ajaran baru.

3. Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD)

   Yaitu tabungan untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

4. Tabungan *Idul Qurban* (TAQURBA)

Yaitu jenis tabungan untuk hari raya *Idul Adha* dalam mempersiapkanpembelian hewan.

5. Tabungan Berjangka (TAJAKA)

   Yaitu tabungan yang hanya dapat diambil dalam jangka waktu yang telah disepakati, seperti 3,6,dan 12 bulan.

6. Tabungan *Idul Fitri* (TADURI)

   Yaitu Tabungan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri.

b) Produk Pembiayaan

1. *Qardhul Hasan*

Pembiayaan tanpa bagi hasil yang diberikan kepada anggota, khususnya masyarakat kurang mampu, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja.

2. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan barang atau modal usaha, di mana BMT membelikan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kembali kepada anggota dengan harga dan angsuran yang disepakati.

3. *Murabahah*

Pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang usaha, di mana BMT membeli barang dan menjualnya kembali kepada anggota dengan margin keuntungan yang disepakati.

4. *Mudharabah*

Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif, di mana seluruh modal disediakan oleh BMT dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

5. Legalitas Hukum KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan didirikan dan dikembangkan sesuai dengan legilitas hukum yang jelas dan bertahap hingga menjadi badan hukum Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kelompok Sawdaya Masyarakat (KSM) mendapatkan surat izin operasional sementara sebagai pra-koperasi dari instansi terkait.
b. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan\ pengurus telah siap. Maka BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dapat dikembangkan menjadi bada hukum koperasi.
c. BMT agam Madani Nagari Pakan Sinayan saat itu memiliki kekayaan disarankan dan ditekan kan untuk mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi koperasi dengan badan hukum.
d. BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan berkembang dan memenuhi syarat sebagai BPR Syariah memperoleh izin kepada pemerintah dan bank Indonesia menjadi BPR Syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

6. SOP Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan

1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.
2) Divisi pembiayaan memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi nasabah sebagai tahap awal penilaian pembiayaan.
3) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, divisi pembiayaan menyusun daftar pengajuan pembiayaan nasabah.
4) Daftar pengajuan pembiayaan diserahkan kepada komite pembiayaan untuk dilakukan penilaian dan pertimbangan.
5) Komite pembiayaan melaksanakan rapat untuk menentukan hasil pengajuan pembiayaan nasabah.
6) Pengajuan pembiayaan yang telah disetujui disahkan dalam rapat komite pembiayaan.
7) Hasil keputusan rapat komite disampaikan kembali kepada divisi pembiayaan untuk ditindaklanjuti.
8) Divisi pembiayaan menyiapkan akad pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang disetujui.
9) Nasabah datang ke kantor BMT untuk menerima dan mempelajari akad pembiayaan yang telah dibuat.
10) Pihak divisi pembiayaan memberikan penjelasan mengenai isi akad, hak, dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan.

11) Nasabah menandatangani akad pembiayaan sebagai bentuk persetujuan atas isi akad yang telah dijelaskan dengan dibubuhi materai 10000
12) Akad pembiayaan kemudian disahkan oleh pihak-pihak terkait dalam lembaga, Manajer dan Pengurus BMT
13) Setelah seluruh proses administrasi dan pengesahan selesai, dana pembiayaan dicairkan kepada nasabah.

B. Hasil Penelitian

1. Peran KJKS BMT Agam Madani dalam Membantu Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa KJKS BMT Agam Madani memiliki peran dalam membantu pengembangan UMKM melalui pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Dalam penelitian ini, menggunakan teori peran lembaga keuangan non bank oleh Kasmir yang menjelaskan, peran KJKS BMT Agam Madani dapat dilihat melalui fungsi lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.[62] Didukung dengan indikator sebagai berikut:

a) Mendukung Pengembangan UMKM

Indikator mendukung pengembangan UMKM dapat dilihat dari bagaimana pembiayaan BBA membantu pelaku usaha dalam

[62] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Nanda:

"Kalau menurut saya, pembiayaan dari BMT ini memang sangat membantu, terutama untuk usaha kecil seperti warung gorengan saya. Dengan adanya tambahan modal, saya bisa beli bahan lebih banyak, jadi jualan tetap jalan setiap hari."[63]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal usaha sehingga usaha dapat terus berjalan. Selanjutnya, Ibuk Rahmi juga menyampaikan:

"Pembiayaan yang saya dapat itu saya pakai untuk warung kopi, seperti beli bahan dan perlengkapan. Alhamdulillah sekarang usaha saya sudah lebih stabil dan ada peningkatan dibanding sebelumnya."[64]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan BBA membantu meningkatkan kestabilan usaha nasabah. Selain itu, Ibuk Asna menjelaskan:

"Kalau saya, pembiayaan ini saya gunakan untuk tambahan modal sawah, seperti beli pupuk dan biaya mengolah lahan."[65]

---

[63] Nanda, wawancara dengan peneliti, pemilik warung gorengan, Pakan Sinayan, 1 Mei 2026.

[64] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi, Pakan Sinayan, 1 Mei 2026.

[65] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah, Pakan Sinayan, 1 Mei 2026.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan BBA juga membantu masyarakat di sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan usaha mereka.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KJKS BMT Agam Madani memiliki peran dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pemberian tambahan modal usaha kepada masyarakat.

b) Memperluas Akses Pembiayaan

Indikator memperluas akses pembiayaan dapat dilihat dari upaya lembaga dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pembiayaan usaha. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Fitria Dewi:

"Untuk pembiayaan di BMT, kami memiliki batas maksimal, yaitu sebesar 2% dari total aset lembaga. Kemudian, untuk pengajuan pembiayaan BBA, anggota harus memenuhi persyaratan administrasi dan melalui uji kelayakan usaha."[66]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa lembaga memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui mekanisme tertentu. Selanjutnya, Ibuk Rahmi menyampaikan:

[66] Fitria Dewi, wawancara dengan peneliti, Kepala Bidang Pembiayaan BMT Agam Madani, Pakan Sinayan, 4 Mei 2026

"Persyaratannya juga cukup banyak, seperti harus minta tanda tangan wali jorong, tanda tangan mamak, dan menunggu hasil rapat."[67]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan, meskipun harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi. Selain itu, Ibuk Asna juga menjelaskan:

"Waktu pengajuan, saya diminta jaminan seperti BPKB yang saya rasa itu memberatkan saya sebab saya baru pertama kali melakukan pengajuan."[68]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa akses pembiayaan masih dipengaruhi oleh adanya persyaratan jaminan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KJKS BMT Agam Madani telah berupaya memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa persyaratan yang dirasakan cukup memberatkan oleh sebagian nasabah.

c) Berkontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha dan pendapatan nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Rahmi:

[67] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.
[68] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah.

"Alhamdulillah sekarang usaha saya sudah lebih stabil dan ada peningkatan dibanding sebelumnya."[69]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi nasabah. Selanjutnya, Ibuk Nanda menjelaskan:

"Dengan adanya tambahan modal, saya bisa beli bahan lebih banyak, jadi jualan tetap jalan setiap hari."[70]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan membantu menjaga keberlangsungan pendapatan usaha nasabah. Selain itu, Ibuk Asna juga menyampaikan:

"Kalau saya, pembiayaan ini saya gunakan untuk tambahan modal sawah, seperti beli pupuk dan biaya mengolah lahan."[71]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan usaha sehingga kegiatan ekonomi tetap berjalan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BBA memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan stabilitas dan keberlangsungan usaha nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator mendukung pengembangan UMKM dan kontribusi terhadap kesejahteraan

[69] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.
[70] Nanda, wawancara dengan peneliti, pemilik warung gorengan.
[71] Asna, wawancara dengan peneliti.

masyarakat dapat dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pembiayaan BBA yang mampu membantu memenuhi kebutuhan modal usaha, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan kondisi usaha nasabah. Namun, indikator memperluas akses pembiayaan masih belum optimal karena dalam proses pengajuan pembiayaan masih terdapat persyaratan administrasi dan jaminan yang dianggap cukup memberatkan oleh sebagian nasabah.

2. Penerapan SOP Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, diketahui bahwa KJKS BMT Agam Madani telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA). Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori SOP pembiayaan Kasmir yang menyatakan bahwa, SOP pmbiayaan merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan, yang mencakup pengajuan, analisis, persetujuan, pencairan, hingga pelunasan.[72] Didukung dengan indikator SOP pembiayaan oleh Tambunan, yaitu kejelasan prosedur pembiayaan, efektivitas pelaksanaan prosedur, dan efisiensi waktu pelaksanaan.[73]

[72] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*.
[73] Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*.

a) Kejelasan Prosedur Pembiayaan

Indikator kejelasan prosedur pembiayaan dapat dilihat dari adanya tahapan pembiayaan yang tersusun secara sistematis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Fitria Dewi:

"Prosedur pembiayaan BBA dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah dengan melengkapi persyaratan administrasi. Selanjutnya, berkas diperiksa oleh pengelola dan dibahas dalam rapat komite pembiayaan untuk menilai kelayakan usaha serta menetapkan harga pokok, jangka waktu, dan margin keuntungan. Jika disetujui, nasabah melakukan penandatanganan akad, dan setelah seluruh administrasi selesai, pembiayaan dapat dicairkan."[74]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa prosedur pembiayaan telah disusun secara jelas dan berurutan. Selanjutnya, Ibuk Rahmi menjelaskan:

"Persyaratannya juga cukup banyak, seperti harus minta tanda tangan wali jorong, tanda tangan mamak, dan menunggu hasil rapat."[75]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa terdapat tahapan administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. Selain itu, Ibuk Asna juga menyampaikan:

[74] Fitria Dewi, wawancara dengan peneliti, Kepala Bidang Pembiayaan BMT Agam Madani.

[75] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.

"Waktu pengajuan, saya diminta jaminan seperti BPKB yang saya rasa itu memberatkan saya sebab saya baru pertama kali melakukan pengajuan."[76]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa prosedur pembiayaan juga mencakup persyaratan jaminan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SOP pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani telah memiliki prosedur yang jelas mulai dari pengajuan hingga pencairan dana.

b) Efektivitas Pelaksanaan Prosedur

Indikator efektivitas pelaksanaan prosedur dapat dilihat dari sejauh mana SOP membantu memperlancar proses pembiayaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Fitria Dewi:

"Pada umumnya nasabah memilih jangka waktu angsuran selama 12 bulan karena disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah."[77]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa prosedur pembiayaan disesuaikan dengan kondisi nasabah. Selanjutnya, Ibuk Fitria Dewi juga menjelaskan:

"Margin keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah sebesar 1% dari total pembiayaan per bulan."[78]

---

[76] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah

[77] Fitria Dewi, wawancara dengan peneliti, Kepala Bidang Pembiayaan BMT Agam Madani.

[78] Fitria Dewi, wawancara dengan peneliti.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa ketentuan pembiayaan telah ditetapkan secara jelas. Selain itu, Ibuk Rahmi menyampaikan:

"Pembiayaan pertama juga dibatasi Rp1.500.000."[79]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa terdapat aturan tertentu dalam pelaksanaan pembiayaan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SOP pembiayaan cukup membantu dalam mengatur pelaksanaan pembiayaan agar berjalan lebih terarah dan terkontrol.

c) Efisiensi Waktu Pelaksanaan

Indikator efisiensi waktu pelaksanaan dapat dilihat dari cepat atau lambatnya proses pembiayaan yang dirasakan oleh nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Rahmi:

"Kalau saya, prosesnya cukup lama, kurang lebih sampai satu bulan. Katanya karena ada pembatasan jumlah nasabah, jadi harus menunggu giliran."[80]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa proses pembiayaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, Ibuk Rahmi juga menjelaskan:

"Harus menunggu hasil rapat."[81]

[79] Rahmi, wawancara dengan peneliti.
[80] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.
[81] Rahmi, wawancara dengan peneliti.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa proses pengambilan keputusan memengaruhi waktu pencairan pembiayaan. Selain itu, Ibuk Asna menyampaikan:

"Waktu pengajuan, saya diminta jaminan seperti BPKB."[82]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa proses pelengkapan persyaratan juga memengaruhi efisiensi waktu pelaksanaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kejelasan prosedur pembiayaan dan efektivitas pelaksanaan prosedur dapat dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari prosedur pembiayaan yang telah disusun secara teratur mulai dari tahap pengajuan sampai pencairan dana, serta adanya aturan pembiayaan yang jelas sehingga pelaksanaan pembiayaan menjadi lebih terarah.

Namun, indikator efisiensi waktu pelaksanaan masih belum optimal karena proses pembiayaan memerlukan waktu yang cukup lama disebabkan oleh tahapan administrasi, proses rapat pembiayaan, dan persyaratan jaminan yang harus dilengkapi oleh nasabah.

3. Efektivitas Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap Pengembangan UMKM di KJKS BMT Agam Madani

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan nasabah dan pihak internal lembaga, efektivitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Gibson yang

[82] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah.

menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan.[83] Dalam penelitian ini, keempat indikator tersebut digunakan karena dinilai sesuai dengan fokus penelitian mengenai efektivitas pembiayaan BBA terhadap pengembangan UMKM.

Jika dikaitkan dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani, maka efektivitas pembiayaan dapat dilihat dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu membantu perkembangan usaha nasabah, memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan, menyesuaikan pembiayaan dengan kondisi nasabah, serta memberikan kepuasan terhadap manfaat pembiayaan yang diterima.

a) Efisiensi

Indikator efisiensi dapat dilihat dari kelancaran proses pembiayaan dan kemudahan akses yang diberikan kepada nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Rahmi:

"Kalau saya, prosesnya cukup lama, kurang lebih sampai satu bulan. Katanya karena ada pembatasan jumlah nasabah, jadi harus menunggu giliran."[84]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa proses pembiayaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, Ibuk Rahmi juga menyampaikan:

[83] Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*.
[84] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.

"Persyaratannya juga cukup banyak, seperti harus minta tanda tangan wali jorong, tanda tangan mamak, dan menunggu hasil rapat."[85]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa prosedur administrasi masih dirasakan cukup rumit. Selain itu, Ibuk Asna menjelaskan:

"Waktu pengajuan, saya diminta jaminan seperti BPKB yang saya rasa itu memberatkan saya."[86]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa persyaratan jaminan memengaruhi kemudahan akses pembiayaan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator efisiensi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam proses administrasi, persyaratan pembiayaan, dan waktu pencairan pembiayaan yang cukup lama.

b) Kepuasan Nasabah

Indikator kepuasan nasabah terhadap manfaat pembiayaan yang diterima. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Nanda:

"Kalau menurut saya, pembiayaan dari BMT ini memang sangat membantu."[87]

[85] Rahmi, wawancara dengan peneliti.
[86] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah.
[87] Nanda, wawancara dengan peneliti, pemilik warung gorengan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan. Selanjutnya, Ibuk Rahmi menjelaskan:

"Alhamdulillah sekarang usaha saya sudah lebih stabil dan ada peningkatan dibanding sebelumnya."[88]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa adanya kepuasan nasabah terhadap dampak pembiayaan bagi usaha mereka. Selain itu, Ibuk Asna juga menyampaikan:

"Pembiayaan ini saya gunakan untuk tambahan modal sawah."[89]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa pembiayaan mampu memenuhi kebutuhan usaha nasabah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah merasa puas terhadap manfaat pembiayaan BBA karena mampu membantu memenuhi kebutuhan usaha dan mendukung perkembangan usaha mereka.

c) Keadaptasian

Indikator keadaptasian dapat dilihat dari kemampuan lembaga dalam menyesuaikan pelaksanaan pembiayaan dengan kondisi dan kemampuan nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Fitria Dewi:

[88] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.
[89] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah.

"Pada umumnya nasabah memilih jangka waktu angsuran selama 12 bulan karena disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah."[90]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pihak BMT menyesuaikan jangka waktu pembiayaan dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Selanjutnya, Ibuk Fitria Dewi juga menjelaskan:

"Margin keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah sebesar 1% dari total pembiayaan per bulan."[91]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa lembaga telah menetapkan ketentuan pembiayaan secara jelas agar dapat disesuaikan dengan kondisi nasabah. Selain itu, adanya proses rapat pembiayaan menunjukkan bahwa lembaga melakukan penilaian kelayakan usaha sebelum pembiayaan diberikan.

d) Pengembangan

Indikator pengembangan dapat dilihat dari kemampuan pembiayaan dalam membantu perkembangan usaha nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibuk Rahmi:

"Alhamdulillah sekarang usaha saya sudah lebih stabil dan ada peningkatan dibanding sebelumnya."[92]

---

[90] Fitria Dewi, wawancara dengan peneliti, Kepala Bidang Pembiayaan BMT Agam Madani.

[91] Fitria Dewi, wawancara dengan peneliti.

[92] Rahmi, wawancara dengan peneliti, pemilik warung kopi.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan berhasil membantu perkembangan usaha nasabah. Selanjutnya, Ibuk Nanda menjelaskan:

"Dengan adanya tambahan modal, saya bisa beli bahan lebih banyak, jadi jualan tetap jalan setiap hari."[93]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan membantu nasabah memenuhi kebutuhan usaha sehingga usaha dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, Ibuk Asna juga menjelaskan:

"Kalau saya, pembiayaan ini saya gunakan untuk tambahan modal sawah, seperti beli pupuk dan biaya mengolah lahan."[94]

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan membantu memenuhi kebutuhan modal usaha pertanian.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator pengembangan tergolong baik karena pembiayaan BBA mampu membantu pelaku UMKM memperoleh tambahan modal untuk mendukung perkembangan usaha mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan dalam efektivitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani

[93] Nanda, wawancara dengan peneliti, pemilik warung gorengan.
[94] Asna, wawancara dengan peneliti, pemilik sawah.

menunjukkan hasil yang baik. Nasabah merasa terbantu dengan pembiayaan yang diberikan dan usaha mereka mengalami perkembangan setelah memperoleh tambahan modal. Selain itu, pihak KJKS BMT Agam Madani juga telah menyesuaikan pembiayaan dengan kondisi dan kemampuan nasabah.

Namun, indikator efisiensi belum optimal karena proses pembiayaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, persyaratan administrasi cukup banyak, serta adanya jaminan yang dirasakan memberatkan oleh sebagian nasabah.

C. Pembahasan

1. Peran KJKS BMT Agam Madani dalam Membantu Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para nasabah serta didukung oleh dokumentasi terkait pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani, diketahui bahwa pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam penelitian ini digunakan teori peran lembaga keuangan nonbank menurut Kasmir yang menyatakan bahwa lembaga keuangan berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat guna menunjang kegiatan ekonomi produktif.[95]

[95] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.

Peran tersebut dianalisis melalui indikator mendukung pengembangan UMKM, memperluas akses pembiayaan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

a) Mendukung Pengembangan UMKM

Indikator mendukung pengembangan UMKM dapat dilihat dari kemampuan pembiayaan BBA dalam membantu nasabah menjalankan serta mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar nasabah menyampaikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani memberikan manfaat bagi usaha yang mereka kelola. Dana pembiayaan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha, seperti membeli bahan baku, menambah perlengkapan usaha, memenuhi kebutuhan operasional, hingga meningkatkan kapasitas usaha.

Ibuk Nanda yang memiliki usaha warung gorengan menjelaskan bahwa tambahan modal dari BMT sangat membantu usahanya agar tetap berjalan. Dana pembiayaan digunakan untuk membeli bahan baku dalam jumlah lebih banyak sehingga kegiatan usaha dapat dilakukan setiap hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan BBA berperan dalam membantu pelaku usaha kecil memenuhi kebutuhan operasional sehingga usaha tetap bertahan dan berkembang.

Selain pada usaha perdagangan, pembiayaan juga dimanfaatkan oleh masyarakat di sektor pertanian. Ibuk Asna

menjelaskan bahwa dana pembiayaan digunakan sebagai tambahan modal untuk membeli pupuk, bibit, dan biaya pengolahan sawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan BBA tidak hanya membantu pelaku usaha perdagangan, tetapi juga mendukung kebutuhan usaha masyarakat di bidang pertanian.

Selanjutnya, Ibuk Rahmi yang menjalankan usaha warung kopi juga memanfaatkan pembiayaan sebagai tambahan modal usaha. Dana tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan usaha dan menambah persediaan barang dagangan. Menurut penuturannya, usaha yang dijalankan menjadi lebih stabil dan mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan.

Apabila dikaitkan dengan teori pengembangan UMKM menurut Munir, pengembangan usaha dapat dilihat dari kemampuan usaha dalam bertahan, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, serta menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan.[96]

Dalam penelitian ini, indikator pengembangan UMKM terlihat dari meningkatnya kemampuan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan.[97] Tambahan modal yang diterima dimanfaatkan untuk membeli bahan baku, menambah persediaan barang, melengkapi kebutuhan usaha, dan mendukung aktivitas

[96] Wahed, *Buku Monograf, Pengembangan Ekonomi Lokal*.

[97] Rachmawati and Yasin, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2."

operasional sehari-hari. Selain itu, peningkatan stabilitas usaha juga menjadi salah satu bentuk pengembangan UMKM.

Ibuk Nanda mampu mempertahankan usaha gorengannya karena tersedianya modal untuk membeli bahan baku, sedangkan Ibuk Rahmi dapat meningkatkan persediaan barang dan perlengkapan usaha sehingga kondisi usahanya menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan BBA membantu memperkuat ketahanan usaha kecil dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Pada sektor pertanian, penggunaan pembiayaan untuk membeli pupuk, bibit, dan membiayai pengolahan lahan juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi usaha masyarakat.

b) Memperluas Akses Pembiayaan

Indikator memperluas akses pembiayaan dapat dilihat dari usaha lembaga dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh tambahan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal lembaga, KJKS BMT Agam Madani terus berupaya menyediakan layanan pembiayaan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif.

Ibuk Fitria Dewi selaku Kepala Bidang Pembiayaan menjelaskan bahwa pembiayaan diberikan kepada anggota yang telah melengkapi persyaratan administrasi dan memiliki usaha yang dinilai layak untuk menerima pembiayaan. Selain itu, pihak

BMT juga melakukan penilaian kelayakan usaha sebelum pembiayaan disetujui.

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Penilaian kelayakan usaha dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa pembiayaan dapat memberikan manfaat bagi nasabah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasnina yang menjelaskan bahwa pembiayaan BBA dilaksanakan melalui tahapan administrasi dan analisis kelayakan usaha sebelum dana diberikan kepada nasabah.[98] Kesamaan tersebut terlihat dari adanya proses seleksi dan pemeriksaan kelayakan usaha dalam penyaluran pembiayaan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan yang dirasakan cukup memberatkan oleh sebagian nasabah. Ibuk Rahmi menjelaskan bahwa proses pengajuan pembiayaan memerlukan beberapa persyaratan administrasi, seperti tanda tangan wali jorong, tanda tangan mamak, serta menunggu hasil rapat.

Selain itu, Ibuk Asna menyampaikan bahwa dirinya diminta menyerahkan jaminan berupa BPKB saat mengajukan

[98] Hasnina, "Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Bmt Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang."

pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun KJKS BMT Agam Madani telah berusaha memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, persyaratan administrasi dan jaminan masih menjadi kendala bagi sebagian nasabah dalam memperoleh pembiayaan.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan teori Kasmir yang menyatakan bahwa lembaga keuangan memiliki peran dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat serta mendukung perkembangan UMKM.

c) Kontribusi Terhadap Masayarakat

Indikator kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pengaruh pembiayaan terhadap kondisi usaha dan tingkat pendapatan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, para nasabah menyampaikan bahwa pembiayaan BBA memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. Tambahan modal yang diterima membantu nasabah memenuhi kebutuhan usaha sehingga kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik.

Ibuk Rahmi menjelaskan bahwa usaha warung kopi miliknya menjadi lebih stabil dan mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan. Sementara itu, Ibuk Nanda menyampaikan bahwa tambahan modal membantu dirinya membeli bahan baku dalam jumlah yang lebih banyak sehingga usaha gorengannya dapat beroperasi setiap hari. Selain itu, Ibuk

Asna menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan usaha pertanian, seperti membeli pupuk dan membiayai pengolahan lahan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan BBA membantu masyarakat dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan pendapatan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri Yenti dan Dola Olivia yang menjelaskan bahwa pembiayaan BBA berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nasabah.[99] Kesamaan tersebut terlihat dari dampak pembiayaan yang membantu nasabah menjaga kestabilan usaha, memenuhi kebutuhan operasional usaha, dan mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil juga mencerminkan nilai ta'awun atau tolong-menolong serta prinsip keadilan dalam kegiatan muamalah. Melalui pembiayaan tersebut, masyarakat yang memiliki keterbatasan modal tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha melalui sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Penerapan SOP Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani

Temuan penelitian mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT

[99] Fitri Yenti and Dola Olivia Veranti, "IMPLEMENTATION OF BAI ' BITSAMAN AJIL (BAA) FINANCING TO INCREASING INCOME ON BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH BANDAR BUAT BRANCH" 7 (2019): 108–20.

Agam Madani memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Hasnina menjelaskan bahwa proses pembiayaan BBA dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan, pemeriksaan administrasi, analisis kelayakan usaha, pelaksanaan akad, hingga pencairan dana pembiayaan.[100] Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa KJKS BMT Agam Madani juga menerapkan tahapan pembiayaan secara sistematis dan berurutan sesuai dengan SOP yang berlaku di lembaga.

Dalam praktiknya, proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan oleh nasabah, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pembahasan dalam rapat komite pembiayaan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana pembiayaan kepada nasabah.

Selain itu, penelitian Arga Fajar menjelaskan bahwa penetapan margin keuntungan dan jangka waktu pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah.[101] Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pihak KJKS BMT Agam Madani menetapkan margin keuntungan sebesar 1% per bulan dan memberikan jangka waktu angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi nasabah.

---

[100] Hasnina, "Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Bmt Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang."

[101] Hasan Sultoni, Arga Fajar Mustofa, Mei Santi, "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL DAN PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO DI BAITUL MAAL WA TAMWIL MUAMALAH TULUNGAGUNG Arga" I (n.d.): 1–32.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada keuntungan lembaga, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan pembayaran nasabah sehingga pembiayaan dapat berjalan lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan usaha masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan indikator SOP menurut Tambunan, penerapan SOP pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KJKS BMT Agam Madani dapat dianalisis melalui indikator kejelasan prosedur pembiayaan, efektivitas pelaksanaan prosedur, dan efisiensi waktu pelaksanaan.[102]

a) Kejelasan Prosedur Pembiayaan

Indikator kejelasan prosedur pembiayaan terlihat dari tersusunnya alur pembiayaan yang sistematis di KJKS BMT Agam Madani, mulai dari pengajuan, verifikasi administrasi, analisis usaha, rapat komite, akad, hingga pencairan dana. Struktur ini menunjukkan bahwa SOP telah berfungsi sebagai pedoman operasional yang membuat proses pembiayaan lebih terarah sekaligus memudahkan kontrol lembaga terhadap setiap tahapan.

Kejelasan prosedur tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, di mana setiap tahap digunakan untuk memastikan pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha layak dan mampu mengembalikan pembiayaan.

[102] Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*.

Dengan demikian, SOP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian risiko pembiayaan bermasalah.

Namun demikian, dalam praktiknya prosedur yang cukup berlapis ini masih menimbulkan kendala bagi sebagian nasabah. Persyaratan administratif seperti tanda tangan pihak nagari, persetujuan keluarga adat, hingga proses rapat komite membuat pengajuan terasa kompleks dan memakan waktu, terlebih pembiayaan awal juga dibatasi. Di sisi lain, persyaratan jaminan berupa BPKB memperkuat aspek keamanan lembaga, tetapi sekaligus menjadi hambatan bagi pelaku UMKM kecil yang memiliki keterbatasan aset sehingga akses pembiayaan belum sepenuhnya inklusif.

b) Efektivitas Pelaksanaan Prosedur

Efektivitas SOP pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani terlihat dari kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan secara tepat sasaran sekaligus menekan risiko. Setiap pengajuan nasabah harus melewati tahapan yang terstruktur, mulai dari pemeriksaan administrasi, analisis kelayakan usaha, hingga keputusan melalui rapat komite sebelum dana dicairkan. Alur tersebut menunjukkan bahwa SOP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar pembiayaan hanya diberikan kepada usaha yang layak dan produktif.

Selain itu, SOP juga menjadi alat pengelolaan risiko karena setiap keputusan pembiayaan didasarkan pada hasil analisis menyeluruh terhadap dokumen dan kondisi usaha nasabah, termasuk identitas, aktivitas usaha, serta jaminan. Hal ini membantu lembaga menjaga stabilitas pembiayaan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Di samping itu, sistem dokumentasi yang tertata rapi memperkuat transparansi dan memudahkan proses pengawasan.

Secara umum, penerapan SOP ini menunjukkan bahwa KJKS BMT Agam Madani telah memiliki sistem pembiayaan yang cukup teratur dan berorientasi pada kehati-hatian. Namun demikian, fokus utama masih lebih menekankan pada pengendalian risiko dibandingkan kemudahan akses, sehingga masih diperlukan penyesuaian agar pelayanan lebih seimbang antara keamanan dan kemudahan bagi nasabah.

c) Efisiensi Waktu Pelaksanaan

Dari aspek efisiensi waktu, penerapan SOP di KJKS BMT Agam Madani masih belum berjalan secara maksimal. Tahapan yang cukup panjang, mulai dari proses administrasi hingga persetujuan melalui rapat komite, menyebabkan pencairan dana tidak selalu berlangsung cepat. Hal ini membuat sebagian nasabah harus menunggu lebih lama untuk memperoleh pembiayaan.

Perbedaan pengalaman nasabah juga menunjukkan bahwa kecepatan layanan belum berjalan secara merata. SOP yang

diterapkan lebih menitikberatkan pada kehati-hatian dan keamanan pembiayaan dibandingkan kecepatan pelayanan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal secara segera, karena keterlambatan pencairan dapat mengganggu kelancaran usaha.

Secara keseluruhan, hal ini menggambarkan adanya keseimbangan yang belum ideal antara pengendalian risiko dan efisiensi layanan. Semakin ketat prosedur yang diterapkan untuk menjaga keamanan pembiayaan, maka semakin besar pula dampaknya terhadap lamanya proses pencairan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam penerapan SOP pembiayaan masih terdapat sejumlah kendala. Temuan ini sejalan dengan penelitian Imam Nawawi yang menjelaskan bahwa persyaratan administrasi dan jaminan sering menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan.[103] Hal serupa juga terlihat dalam penelitian ini, di mana nasabah mengeluhkan berbagai persyaratan seperti tanda tangan wali jorong, tanda tangan mamak, pembatasan jumlah nasabah, dan pembatasan nominal pembiayaan nasabah.

Temuan ini juga sejalan dengan teori Kasmir yang menyatakan bahwa SOP pembiayaan merupakan rangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengajuan,

[103] M. Zidny Nafi' Hasbi Imam Nawawi, "Problematika Implementasi Akad Bai ` Bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo)" 7, no. 03 (2021): 1338–46.

analisis, persetujuan, pencairan, hingga pelunasan.[104] Dalam penelitian ini, penerapan SOP di KJKS BMT Agam Madani memang telah menunjukkan alur yang terstruktur dan berurutan sebagai bentuk pengendalian dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara umum penerapan SOP pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil di KJKS BMT Agam Madani sudah berjalan dengan cukup baik karena memiliki prosedur yang jelas, mampu mendukung efektivitas pembiayaan, serta berfungsi dalam mengendalikan risiko pembiayaan.

Namun, di sisi lain, implementasinya masih menghadapi tantangan terutama pada aspek efisiensi waktu pelayanan serta persyaratan administrasi yang dirasakan cukup memberatkan oleh sebagian nasabah sehingga masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

3. Efektivitas Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap Pengembangan UMKM di KJKS BMT Agam Madani

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Gibson yang mencakup, yaitu keefektifan, kepuasan, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan pengembangan.[105] Hasil wawancara dengan nasabah dan pihak lembaga menunjukkan bahwa pembiayaan BBA pada

[104] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
[105] Sari, *Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.*

dasarnya telah berfungsi sebagai instrumen pendukung pengembangan UMKM, terutama dalam penyediaan modal usaha dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Namun, tingkat efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidakseimbangan antara tujuan program dan mekanisme pelaksanaannya.

a) Keefektifan

Pada indikator keefektifan, pembiayaan BBA dinilai cukup mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu penguatan modal usaha nasabah. Hal ini tercermin dari pernyataan Ibuk Rahmi yang menyebutkan bahwa usahanya menjadi lebih stabil setelah memperoleh pembiayaan, serta Ibuk Nanda yang mengungkapkan bahwa tambahan modal memungkinkan usahanya tetap beroperasi setiap hari.

Dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku dan perlengkapan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan telah berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan usaha, sehingga tujuan program dapat dikatakan tercapai pada tingkat praktis.

Temuan ini sejalan dengan Laili & Kusumaningtias yang menegaskan bahwa pembiayaan BMT berperan dalam memperkuat modal dan menjaga keberlanjutan usaha mikro.[106]

[106] Novia Yusfiyanti Laili and Rohmawati Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)" 6, no. 03 (2020): 436–43.

b) Kepuasan Nasabah

Pada indikator kepuasan nasabah secara umum merasakan manfaat dari pembiayaan yang diterima karena mampu menunjang kelancaran usaha mereka. Namun, kepuasan tersebut bersifat relatif karena masih dipengaruhi oleh pengalaman berbeda antar nasabah dalam proses pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak hanya ditentukan oleh hasil pembiayaan, tetapi juga oleh proses layanan.

Kepuasan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas organisasi atau perusahaan. Kepuasan menunjukkan sejauh mana organisasi mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan maupun anggota organisasi, seperti karyawan. Tingkat kepuasan yang tinggi menandakan bahwa organisasi berhasil memberikan pelayanan, lingkungan kerja, maupun hasil kerja yang sesuai dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepuasan dapat menjadi tanda adanya masalah dalam pelayanan, manajemen, atau sistem kerja organisasi.

Kepuasan pelanggan menjadi aspek yang sangat penting karena pelanggan merupakan pihak yang menentukan keberlangsungan organisasi. Organisasi yang mampu memberikan pelayanan berkualitas akan menciptakan rasa puas pada pelanggan sehingga pelanggan cenderung tetap menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, organisasi

perlu memahami kebutuhan pelanggan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar tingkat kepuasan pelanggan tetap terjaga.[107]

Pengukuran kepuasan biasanya dilakukan melalui survei atau kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap pelayanan atau kinerja organisasi. Survei kepuasan dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada pelanggan maupun karyawan untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap berbagai aspek organisasi. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kepuasan secara keseluruhan dan menentukan bagian yang perlu diperbaiki. Salah satu indikator pengukuran kepuasan adalah tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan organisasi. Pelayanan yang cepat, ramah, tepat, dan berkualitas biasanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan melihat penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayanan, kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.[108]

Selain itu, loyalitas pelanggan juga menjadi indikator penting dalam pengukuran kepuasan. Loyalitas menunjukkan

---

[107] Stephen P Robbins and Timothy A Judge, *Essentials of Organizational Behavior* (London: Pearson, 2019).

[108] Leon G Schiffman and Joseph Wisenblit, *Consumer Behavior* (New York: Pearson, 2019).

kesediaan pelanggan untuk tetap menggunakan produk atau jasa organisasi secara berulang. Pelanggan yang puas cenderung memiliki loyalitas yang tinggi karena merasa kebutuhan dan harapannya terpenuhi. Pengukuran loyalitas pelanggan dapat dilihat dari tingkat pembelian ulang, kesediaan pelanggan merekomendasikan produk kepada orang lain, serta komitmen pelanggan untuk tetap menggunakan layanan organisasi dalam jangka panjang.

Keluhan atau komplain pelanggan juga menjadi bagian penting dalam mengukur kepuasan. Jumlah keluhan yang sedikit biasanya menunjukkan bahwa pelanggan merasa puas terhadap pelayanan organisasi. Sebaliknya, banyaknya komplain dapat menjadi indikasi adanya ketidakpuasan pelanggan terhadap produk atau pelayanan yang diberikan. Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan melihat jumlah keluhan yang masuk, jenis keluhan pelanggan, kecepatan organisasi dalam menangani komplain, serta kemampuan organisasi dalam memberikan solusi terhadap masalah pelanggan.

Tingkat kenyamanan dan kepercayaan pelanggan juga menjadi indikator pengukuran kepuasan. Pelanggan yang merasa nyaman dan percaya terhadap organisasi akan lebih mudah merasa puas dan loyal.[109] Kenyamanan dapat dilihat dari suasana pelayanan, kemudahan akses layanan, keamanan, serta hubungan

[109] Francis Buttle and Stan Maklan, *Customer Relationship Management: Concepts and Technologies* (New York: Routledge, 2019).

yang baik antara organisasi dan pelanggan. Sementara itu, kepercayaan pelanggan dapat dilihat dari keyakinan pelanggan terhadap kualitas produk, kejujuran organisasi, dan kemampuan organisasi dalam memenuhi janji pelayanan.

Selain pelanggan, kepuasan kerja karyawan juga menjadi bagian penting dalam pengukuran kepuasan organisasi. Karyawan yang puas terhadap pekerjaannya cenderung bekerja lebih baik, lebih produktif, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja, hubungan dengan atasan, sistem penghargaan, beban kerja, serta kesempatan pengembangan karier. Pengukuran kepuasan kerja biasanya dilakukan melalui survei internal organisasi untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan motivasi kerja karyawan.[110]

Dalam penelitian, pengukuran kepuasan umumnya menggunakan beberapa metode, seperti skala Likert, wawancara, dan survei kepuasan pelanggan. Skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan. Responden diminta memilih jawaban sesuai tingkat kepuasan yang dirasakan. Adapun kategori penilaiannya biasanya terdiri dari:

a. Sangat Setuju (5)
b. Setuju (4)
c. Netral (3)

[110] Luis R Gomez-Mejia, David B Balkin, and Robert L Cardy, *Managing Human Resources* (Boston: Pearson, 2016).

d. Tidak Setuju (2)

e. Sangat Tidak Setuju (1)

c) Efisiensi

Pada indikator kemampuan beradaptasi, lembaga telah menunjukkan upaya penyesuaian melalui penetapan margin dan jangka waktu angsuran berdasarkan kemampuan nasabah. Namun, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa persyaratan administrasi dan jaminan masih menjadi hambatan bagi sebagian nasabah, khususnya pelaku usaha kecil dengan keterbatasan aset.

Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi lembaga masih bersifat parsial, karena fleksibilitas kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh karakteristik nasabah. Temuan ini sejalan dengan Jakaria yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan adaptif, namun implementasinya sering terkendala pada aspek teknis di lapangan.[111]

Efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas organisasi atau perusahaan. Efisiensi menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu tanpa mengurangi kualitas hasil, maka semakin tinggi tingkat efisiensi organisasi tersebut. Dalam

[111] Dandy Jakaria and Moh Iqbal, "UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BMT AL-ISHLAH MITRA" 4, no. 2 (2024): 677–91.

praktiknya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga mencakup penggunaan waktu, tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi secara tepat guna.

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui perbandingan antara input dan output. Input merupakan seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses kerja, seperti biaya operasional, tenaga kerja, waktu, energi, dan bahan baku. Sementara itu, output adalah hasil yang diperoleh dari proses tersebut, misalnya jumlah produk yang dihasilkan, kualitas pelayanan, atau tingkat pencapaian target organisasi. Jika organisasi mampu menghasilkan output yang besar dengan penggunaan input yang relatif kecil, maka organisasi tersebut dapat dikatakan efisien.[112]

Salah satu cara mengukur efisiensi adalah melalui perbandingan biaya operasional dengan hasil produksi. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana organisasi mampu mengendalikan pengeluaran dalam kegiatan operasionalnya. Misalnya, perusahaan yang dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar dengan biaya produksi yang rendah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan terlalu besar dibandingkan hasil yang diperoleh, maka organisasi dianggap kurang efisien. Oleh karena itu, pengendalian biaya menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi organisasi.

[112] Dhruv Grewal and Michael Levy, *Marketing Management* (New York: McGraw-Hill, 2021).

Selain biaya operasional, efisiensi juga dapat diukur melalui tingkat penggunaan waktu kerja. Waktu merupakan sumber daya yang sangat berharga dalam organisasi. Organisasi yang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu atau bahkan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kerja menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pengukuran ini dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecepatan pelayanan, maupun minimnya waktu yang terbuang dalam proses kerja. Semakin efektif penggunaan waktu, maka semakin baik tingkat efisiensi organisasi tersebut.

Produktivitas karyawan juga menjadi indikator penting dalam pengukuran efisiensi. Produktivitas menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output berdasarkan jumlah tenaga dan waktu yang digunakan. Karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak dengan kualitas yang baik menunjukkan produktivitas tinggi, sehingga mendukung terciptanya efisiensi organisasi. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan melalui jumlah hasil kerja per jam, pencapaian target kerja, serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan.[113]

Selanjutnya, efisiensi dapat dilihat melalui rasio input dan output. Rasio ini digunakan untuk membandingkan jumlah sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh.

[113] Robbins and Judge, *Essentials of Organizational Behavior*.

Apabila output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan input yang digunakan, maka organisasi dinilai efisien. Sebaliknya, jika penggunaan input terlalu besar tetapi hasil yang dicapai rendah, maka organisasi dianggap belum efisien. Rasio input dan output biasanya digunakan dalam evaluasi kinerja perusahaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sumber daya.[114]

Penghematan penggunaan sumber daya juga menjadi bagian dari pengukuran efisiensi. Organisasi yang mampu mengurangi pemborosan bahan baku, energi, waktu, maupun biaya operasional tanpa mengurangi kualitas hasil kerja menunjukkan kemampuan efisiensi yang baik. Penghematan ini dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi, penerapan sistem kerja yang efektif, serta pengawasan yang baik terhadap proses operasional. Dengan adanya penghematan sumber daya, organisasi dapat meningkatkan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Dalam penelitian, indikator efisiensi biasanya diukur menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner atau angket dengan skala Likert. Responden diminta memberikan penilaian terhadap beberapa pernyataan terkait penggunaan biaya, waktu kerja, produktivitas, dan penghematan sumber daya dalam organisasi. Contoh pernyataan yang digunakan antara lain:

[114] Alnoor Bhimani et al., *MANAGEMENT AND*, n.d.

a. Organisasi mampu menekan biaya operasional secara efektif.
b. Pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
c. Karyawan bekerja secara produktif sesuai target.
d. Penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal.
e. Organisasi mampu meminimalkan pemborosan dalam operasional.

Melalui pengukuran tersebut, peneliti dapat mengetahui tingkat efisiensi organisasi sekaligus menilai sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan optimal.

d) Pengembangan

pada indikator pengembangan, pembiayaan BBA terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha nasabah. Hal ini terlihat dari peningkatan persediaan barang, penguatan modal kerja, serta keberlanjutan usaha yang lebih stabil setelah memperoleh pembiayaan.

Pengembangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas organisasi. Pengembangan menunjukkan kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tuntutan lingkungan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Organisasi yang memiliki tingkat pengembangan yang baik akan mampu bertahan,

berkembang, dan bersaing dalam jangka panjang. Pengembangan tidak hanya berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga mencakup pengembangan sistem kerja, teknologi, strategi organisasi, dan kemampuan organisasi dalam menciptakan keberlanjutan usaha.

Pengembangan organisasi dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh. Dalam era persaingan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, organisasi dituntut untuk terus melakukan pembaruan agar tetap relevan dengan kebutuhan lingkungan. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan berbagai strategi pengembangan, seperti pelatihan karyawan, peningkatan sistem kerja, penggunaan teknologi modern, serta penyusunan strategi jangka panjang yang terarah. Semakin baik kemampuan organisasi dalam melakukan pengembangan, maka semakin tinggi pula efektivitas organisasi tersebut.[115]

Salah satu indikator pengembangan adalah program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar mampu bekerja secara lebih efektif dan profesional. Organisasi yang rutin melaksanakan pelatihan menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kualitas

[115] Gibson, Ivancevich, and Donnelly, *Organizations: Behavior, Structure, Processes*.

SDM. Pengukuran indikator ini dapat dilihat dari jumlah program pelatihan yang dilakukan, frekuensi pelatihan, jenis pelatihan yang diberikan, serta tingkat partisipasi karyawan dalam mengikuti pelatihan tersebut.

Selain pelatihan, peningkatan kompetensi karyawan juga menjadi indikator penting dalam pengukuran pengembangan organisasi. Kompetensi mencerminkan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Organisasi yang berkembang akan terus mendorong karyawannya untuk meningkatkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, seminar, maupun pengalaman kerja. Pengukuran indikator ini dapat dilakukan dengan melihat peningkatan keterampilan kerja, kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, kreativitas, serta kualitas hasil kerja karyawan setelah mengikuti program pengembangan.

Pengembangan teknologi dan sistem kerja juga menjadi bagian penting dalam pengukuran pengembangan organisasi. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi modern agar proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Organisasi yang mampu mengembangkan sistem kerja berbasis teknologi biasanya memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pengukuran indikator ini dapat dilihat dari penggunaan aplikasi atau sistem digital dalam operasional organisasi, pembaruan alat kerja,

kemudahan sistem pelayanan, serta peningkatan efektivitas kerja setelah penggunaan teknologi baru.[116]

Perencanaan strategis jangka panjang juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam melakukan pengembangan. Organisasi yang baik tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga memiliki rencana yang jelas untuk masa depan. Perencanaan strategis dilakukan agar organisasi mampu menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Pengukuran indikator ini dapat dilihat dari keberadaan visi dan misi yang jelas, program kerja jangka panjang, strategi pengembangan organisasi, serta kemampuan organisasi dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Kemampuan organisasi mempertahankan eksistensi juga menjadi indikator pengembangan yang penting. Organisasi yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi menunjukkan bahwa organisasi tersebut memiliki sistem pengembangan yang baik. Keberlangsungan organisasi dapat dilihat dari kemampuan mempertahankan pelanggan, menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan pendapatan, serta mempertahankan posisi organisasi di tengah persaingan. Semakin kuat kemampuan organisasi dalam mempertahankan keberadaannya, maka semakin baik tingkat pengembangannya.

---

[116] Handoko, *Organisasi Dan Manajemen*.

Dalam penelitian, pengukuran pengembangan organisasi dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satunya adalah dengan melihat jumlah pelatihan yang dilakukan organisasi dalam periode tertentu. Semakin banyak program pengembangan yang dilaksanakan, maka semakin besar perhatian organisasi terhadap peningkatan kualitas SDM. Selain itu, pengukuran juga dapat dilakukan dengan menilai tingkat peningkatan keterampilan karyawan setelah mengikuti pelatihan atau program pengembangan.

Metode lain yang digunakan adalah evaluasi pencapaian target pengembangan organisasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program-program pengembangan yang direncanakan telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Pengukuran juga dapat dilakukan melalui pertumbuhan organisasi dari waktu ke waktu, seperti peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan produktivitas, perkembangan teknologi, maupun peningkatan kualitas pelayanan organisasi.

Secara umum, pengukuran efektivitas indikator pengembangan dapat dilakukan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis laporan organisasi. Kuesioner biasanya digunakan untuk mengetahui persepsi responden mengenai pelaksanaan pengembangan organisasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih

mendalam mengenai program pengembangan yang dijalankan organisasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan pengembangan dalam organisasi. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mempelajari laporan pelatihan, data pengembangan SDM, maupun laporan pertumbuhan organisasi. Melalui pengukuran tersebut, peneliti dapat mengetahui sejauh mana organisasi mampu melakukan pengembangan untuk meningkatkan kualitas organisasi dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Pernyataan nasabah seperti Ibuk Rahmi dan Ibuk Nanda menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya bersifat konsumtif modal, tetapi juga mendorong penguatan struktur usaha secara bertahap. Temuan ini diperkuat oleh Musdiana & Herianingrum yang menyatakan bahwa pembiayaan BMT berdampak pada peningkatan aset, pendapatan, dan keberlanjutan usaha UMKM.[117]

[117] Rohmah Niah Musdiana, "EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM (Studi Kasus Pada BMT NURUL JANNAH GRESIK)" 1, no. 1 (2015): 21–36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran KJKS BMT Agam Madani dalam Membantu Pengembangan UMKM melalui Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), Penerapan SOP Pembiayaan BBA, serta Efektivitas Pembiayaan BBA terhadap Pengembangan UMKM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Peran KJKS BMT Agam Madani dalam pengembangan UMKM melalui pembiayaan BBA**, berada pada kategori cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan pembiayaan dalam menyediakan tambahan modal bagi pelaku UMKM, membantu menjaga kelangsungan usaha, serta mendukung peningkatan stabilitas dan perkembangan usaha nasabah. Namun demikian, pada aspek perluasan akses pembiayaan masih ditemukan kendala, terutama terkait persyaratan administrasi dan adanya jaminan yang dirasakan cukup memberatkan oleh sebagian nasabah.
2. **Penerapan SOP pembiayaan BBA di KJKS BMT Agam Madani**, telah dilaksanakan secara cukup terstruktur dan sistematis. Prosedur pembiayaan dimulai dari tahap pengajuan, analisis kelayakan, rapat komite pembiayaan, penandatanganan akad, hingga pencairan dana. Secara umum SOP tersebut telah membantu mengarahkan proses pembiayaan agar lebih tertib. Namun, dari sisi efisiensi waktu, proses pembiayaan masih tergolong lambat karena dipengaruhi oleh

banyaknya tahapan administrasi, proses rapat, serta pemenuhan persyaratan jaminan.

3. **Efektivitas pembiayaan BBA terhadap pengembangan UMKM**, menunjukkan hasil yang cukup efektif. Hal ini terlihat dari aspek kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan, di mana nasabah merasakan manfaat pembiayaan dalam mendukung perkembangan usaha serta menyesuaikan dengan kemampuan pembayaran mereka. Akan tetapi, dari aspek efisiensi, pembiayaan masih belum optimal karena masih terdapat hambatan berupa prosedur administrasi yang cukup kompleks, waktu pencairan yang relatif lama, serta persyaratan yang cukup banyak.

Secara keseluruhan, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di KJKS BMT Agam Madani telah memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan UMKM, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada efisiensi proses dan kemudahan akses pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan**

   Disarankan agar dapat meningkatkan kemudahan akses pembiayaan dengan melakukan penyederhanaan terhadap beberapa persyaratan administrasi, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian lembaga. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pencairan pembiayaan

agar dapat berlangsung lebih cepat dan efisien, misalnya melalui optimalisasi administrasi serta percepatan mekanisme rapat komite pembiayaan.

2. **Bagi Nasabah atau Calon Nasabah**

   Diharapkan dapat memahami dengan baik prosedur serta persyaratan pembiayaan yang telah ditetapkan oleh lembaga, serta memanfaatkan dana pembiayaan secara optimal untuk pengembangan usaha agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal.

3. **Bagi Peneliti**

   Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang belum diteliti, seperti kualitas pelayanan, tingkat risiko pembiayaan, atau dampak jangka panjang pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan UMKM, sehingga kajian yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, Daron, and James A Robinson. *The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty*. Penguin Press, 2019.

Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, 2001.

Bariroh, Arrizqah. "Strategi Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Istithmar* 7, no. 1 (2023): 23–33. https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205.

Bhimani, Alnoor, Charles T Horngren, Srikant M Datar, and Madhav V Rajan. *MANAGEMENT AND*, n.d.

Buttle, Francis, and Stan Maklan. *Customer Relationship Management: Concepts and Technologies*. New York: Routledge, 2019.

Dendawijaya, L. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Diman, Hadi Ismanto & Tohir. "ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERIAN PINJAMAN PROGRAM PEMBIAYAAN UMKM OLEH KOPERASI," 2013.

Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. "PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI FASILITASI PIHAK EKSTERNAL DAN POTENSI INTERNAL (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha 'Emping Jagung' Di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)" 1, no. 6 (n.d.): 1286–95.

Gibson, James L, John M Ivancevich, and James H Donnelly. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. McGraw-Hill, 1996.

Gomez-Mejia, Luis R, David B Balkin, and Robert L Cardy. *Managing Human Resources*. Boston: Pearson, 2016.

Grewal, Dhruv, and Michael Levy. *Marketing Management*. New York: McGraw-Hill, 2021.

Hal, Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hal 192-194*, 2008.

Hamza, Lies Maria, and Devi Agustien. "The Influence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises on National Income in the MSME Sector in Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): 127–35.

Handayani, Kadek. "Indikator Penting Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM." *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)* 8, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.23983.

Handoko, T Hani. *Organisasi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2003.

Harjanto, David Dwi, and Putu Dana Karningsih. "Development of Lean Assessment Tools Dimensions and Indicators For SMEs in Indonesia." *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System*

Engineering) 5, no. 1 (2021): 21–29. https://doi.org/10.21070/prozima.v5i1.1426.

Haryanto, Sahamuddin, and Arifuddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pert. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2007.

Hasnina, Hasnina. "Implementasi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Di Bmt Nurul Iman Bungi Kabupaten Pinrang." *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021): 1–22. https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2154.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah" 9, no. 1 (2015): 183–204.

Imam Nawawi, M. Zidny Nafi' Hasbi. "Problematika Implementasi Akad Bai ` Bitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam (Study Kasus BMT Sidogiri Cabang Situbondo)" 7, no. 03 (2021): 1338–46.

Jakaria, Dandy, and Moh Iqbal. "UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BMT AL-ISHLAH MITRA" 4, no. 2 (2024): 677–91.

Juli, No, Fadila Rahmawati, Alamat Jl, Gegerkalong Hilir, Kec Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, and Jawa Barat. "Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur The Importance of Standard Operating Procedure (SOP) in Improving Operational Efficiency and Consistency in the Company M" 1, no. 3 (2024): 2–15.

Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2021.

———. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Laili, Novia Yusfiyanti, and Rohmawati Kusumaningtias. "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)" 6, no. 03 (2020): 436–43.

Lantu, Donald Crestofel, Mochamad Sandy Triady, Ami Fitri Utami, and Achmad Ghazali. "Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM Di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model." *Jurnal Manajemen Teknologi* 15, no. 1 (2016): 77–93. https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.1.6.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Martono, dan Agus Harjito. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.

Muhammad. "Sistem Prosedur Operasional Bank Syariah , (Yogyakarta: UII Press, 2000) Hal 119," 2000, 15–39.

Musdiana, Rohmah Niah. "EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA UMKM (Studi Kasus Pada BMT NURUL JANNAH GRESIK)" 1, no. 1 (2015): 21–36.

Nurdiansyah, Rifqi, Muhammad Salman Al Farisi, Achmad Budi Susetyo, Bayu, Sigit Kusbiantoro, and Muhajjir. "Pelaksanaan Akad Bai` Bitsaman Ajil

Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Bmt Sidogiri)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 327–34. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7420.

Pratiwi, Rahmadytha Adelia, and Kiagus Muhammad Sobri. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN" 11, no. 2 (2022): 17–34.

Purnoto, and Danang Dwi Prasetyo. "Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (Studi Kasus Di Bmt Ya Ummi Fatimah Pati)." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 1 (2020): 73–90. https://doi.org/10.54396/qlb.v1i1.109.

Rachmawati, Desy Wulan, and Ach. Yasin. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Nasabah BSI KCP Mojopahit 2." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 145–56.

Rahayu, Susiana Puji, Indah Purnamawati, Bunga Maharani, and Jln Kalimantan. "Analisis Perkembangan UMKM Pada Pembiayaan Al-Bai ' Bitsaman Ajil (BBA) Pada Usaha Produktif (Studi Kasus Pada UMKM Nasabah Dari BMT-Maslahah Sidogiri Cabang Olean-Situbondo) (A Nalysis Of SMEs Development in Al-Bai ' Bitsaman Ajil (BBA) Financing ," 2012.

Renaldi, Rendi, Slamet Karmawan, and Keberadaan Lembaga. "PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM Keuangan Yang Berlandaskan Keadilan , Kemanfaatan (Maslahat)," 3, no. 2 (2024): 102–14.

Rivai, Veithzal, & Arifin, Arviyan. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Robbins, Stephen P, and Timothy A Judge. *Essentials of Organizational Behavior*. London: Pearson, 2019.

Salam, Dwi purnamasari & Abdullah. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 2, no. 1 (2019): 133–46.

Santoso. *Lebih Memahami SPO Standard Operating Procedure*. Surabaya: Kata Pena, 2014.

Sari, Ade Risna. *Efektivitas Peran Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

Sarwoko, Endi. "227-Article Text-127-1-10-20140405," 2008, 172–88.

Schein, Edgar H. *Organizational Psychology*. New Jersey: Prentice Hall, 1980.

Schiffman, Leon G, and Joseph Wisenblit. *Consumer Behavior*. New York: Pearson, 2019.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter Dan Perbankan*. jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI), 2000.

Sudirjo, Frans, Dian Wahyuningsih, Gatot Wijayanto, and Dwi Wahyono. *TEORI PERILAKU KONSUMEN DAN STRATEGI PEMASARAN*. Edited by Andi

Asari. Kota Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Sultoni, Arga Fajar Mustofa, Mei Santi, Hasan. "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD BAI' BITSAMAN AJIL DAN PENETAPAN MARGIN KEUNTUNGAN PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO DI BAITUL MAAL WA TAMWIL MUAMALAH TULUNGAGUNG Arga" I (n.d.): 1–32.

Tambunan, Rudi M. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maistas Publishing, 2013.

Wahed, Sishadiyati Mohammad. *Buku Monograf, Pengembangan Ekonomi Lokal*. Vol. 4. CV Mitra Abisatya, 2020.

Wibowo, Agus, M Kom, M Si, Pengantar Pengantar, Pengantar Kewirausahaan, and Kewirausahaan Kewirausahaan. *Pengantar KEWIRAUSAHAAN*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Yenti, Fitri, and Dola Olivia Veranti. "IMPLEMENTATION OF BAI ' BITSAMAN AJIL (BAA) FINANCING TO INCREASING INCOME ON BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH BANDAR BUAT BRANCH" 7 (2019): 108–20.

Lampiran-Lampiran

Wawancara dengan pegawai dan nasabah pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan





Alur pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan



Surat izin penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0821/Un.26.3/PP.07/04/2026 27 April 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan
Kec. Banuhampu Kab. Agam

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **MHD. Rafly Syahputra**
NIM	: 3322341
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Efektivitas SOP Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Untuk Pengembangan UMKM (Studi Kasus: KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)"***
Lokasi Penelitian	: KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam
Waktu	: 27 April s.d 27 Mei 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Surat balasan telah melakukan penelitian

BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)
AGAM MADANI NAGARI PAKAN SINAYAN
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM
Badan Hukum No : 154/BH/DKPP/P1/I/2008
Alamat ; Jalan Raya Padang Luar-Maninjau km 3 , Nagari Pakan Sinayan, Kode Pos : 26181

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 022/BMT-AMPS/VII/2025 Pakan Sinayan, 09 Juli 2026
Hal : SURAT KETERANGAN
Lamp : -

Yang bertanda tangan dibawah ini;
Nama : Avivah Hazanah
Jabatan : Pengelola BMT Agam Madani Pakan Sinayan

Menyatakan bahwa:
Nama : **MHD. Rafly Syahputra**
NIM : **3322341**
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : Delapan
Judul Skripsi : *"Efektivitas SOP Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) untuk Pengembagan UMKM (studi kasus KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan)"*

Telah melakukan penelitian di KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan.
Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pakan Sinayan, 09 Juli 2026
Pengelola BMT

Avivah Hazanah